

IMPLIKASI YURIDIS PERUBAHAN JENIS DELIK PADA
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

Kartiko Yudi Prakosa

125010107111183



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

IMPLIKASI YURIDIS PERUBAHAN JENIS DELIK PADA
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Identitas Peneliti :

a. Nama : Kartiko Yudi Prakosa

b. NIM : 125010107111183

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jangka Waktu Penelitian : Bulan


Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama,


Dr. Bambang Sugiri, SH., MS.

NIP.19570717 198403 1 002

Pembimbing Pendamping,


Dr Yuliati, SH.,LL.M.

NIP.19660710 199203 2003

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Pidana,



Dr Yuliati, SH.,LL.M.

NIP: 19660710 199203 2003

LEMBAR PENGESAHAN**IMPLIKASI YURIDIS PERUBAHAN JENIS DELIK PADA
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Oleh:

Kartiko Yudi Prakosa**NIM. 125010107111183**Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal : **11 JUL 2018**

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Dr. Bambang Sugiri, SH., MS.**NIP. 19570717 198403 1 002**
Dr Yuliati, SH.,LL.M.**NIP. 19660710 199203 2003**
Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Dekan Fakultas Hukum,


Dr Yuliati, SH.,LL.M.**NIP: 19660710 199203 2 003**
Dr. Rachmad Safaat, SH., M.Si**NIP: 19620805 198802 1 001**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama: Kartiko Yudi Prakosa

Nim : 125010107111183

Menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini adalah asli karya peneliti, tidak ada karya/data orang lain yang dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapat gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipandan tau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat. Jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lainyang dipublikasikan maka saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, Mei 2018

Menyatakan,



Kartiko Yudi Prakosa

NIM. 125010107111183

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penelitian skripsi ini dibuat dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Oleh sebab itu, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besar atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan, karena penulis menyadari sepenuhnya tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terselesaikan.

Melalui kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

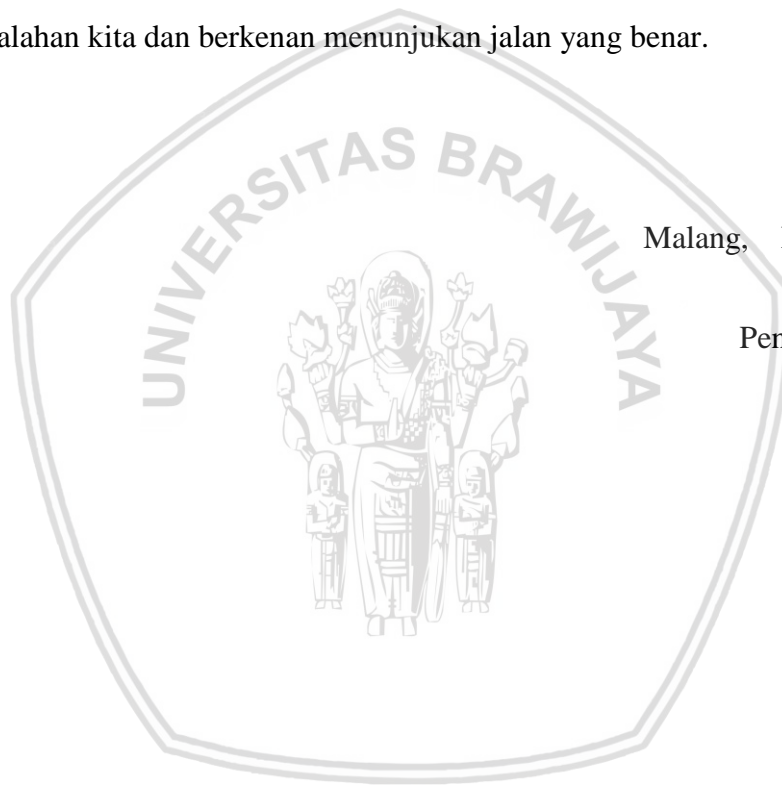
1. Bapak Dr. Rachmad Syafa'at, SH., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Dr Yuliati, SH.,LL.M. selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan, waktu, motifasinya serta pengarahan yang diberikan dalam penelitian skripsi ini..
3. Bapak Dr. Bambang Sugiri, SH., MS. selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan, waktu dan kesabarannya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh staf bagian Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang memberikan bantuan serta informasi kepada peneliti.
5. Serta pihak-pihak lain yang turut membantu menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Semoga segala kontribusi, dorongan, bimbingan, bantuan dan keikhlasan yang telah diberikan kepada peneliti mendapat imbalan setimpal, serta diberikan berkah, rahmat, dan HidayahNya.

Peneliti yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu peneliti harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata peneliti mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini peneliti melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Tuhan yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukan jalan yang benar.

Malang, Mei 2018

Peneliti,



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
RINGKASAN.....	xi
SUMMARY.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Penelitian.....	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana	
1. Pengertian tentang Tindak Pidana.....	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	13
B. Tinjauan Umum tentang Delik	
1. Pengertian tentang Delik.....	18
2. Macam-Macam Delik.....	21
C. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta	
1. Definisi Hak Cipta.....	24

2. Ciri-ciri Hak Cipta.....	27
3. Jenis Ciptaan yang Dilindungi.....	28
4. Sejarah Perkembangan Hak Cipta di Indonesia.....	32
5. Prinsip Hak Kekayaan Intelektual.....	34
6. Dasar Hukum Hak Cipta.....	37
D. Tinjauan Umum Pelanggaran Hukum Hak Cipta	
1. Pengaturan Standar Minimum Perlindungan hak Cipta.....	41
2. Perlindungan Hukum Hak Cipta.....	43
3. Aparat Penyidik dalam Pelanggaran Hak Cipta.....	45
4. Kewenangan Penyidik dalam Menangani Pelanggaran Hak Cipta.....	46
5. Kewajiban Penyidik dalam Menangani Pelanggaran Hak Cipta.....	47
6. Proses Penanganan Pelanggaran Hak Cipta.....	48
7. Sistem Perlindungan Hak Cipta.....	49

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	53
B. Pendekatan Penelitian.....	53
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	54
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	55
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	56
F. Definisi Konseptual.....	56

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Sifat Delik terhadap Undang-Undang	
Hak Cipta di Indonesia.....	58
1. Perkembangan Sifat Delik	58
2. Mekanisme Pelanggaran Hak Cipta.....	62
B. Implikasi Yuridis Perubahan Jenis Delik pada Undang-Undang	
Nomor 28 tahun 2014 tentang hak Cipta.....	67
1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.....	67
2. Perlindungan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.....	68
C. Tujuan Pengaturan Undang-Undang Nomor 28 tahun	
2014 tentang Hak Cipta	72
1. Tujuan Perubahan Delik	72
2. Faktor yang Mendorong Perubahan.....	73
3. Konsekuensi Perubahan Delik.....	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA	84-87
-----------------------------	--------------

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran II. Foto Copy Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran III. Surat Keterangan Deteksi Plagiasi



RINGKASAN

KARTIKO YUDI PRAKOSA, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2018, “Implikasi Yuridis Perubahan Jenis Delik pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta”. Dr. Bambang Sugiri, SH., MS, Dr Yuliati, SH.,LL.M.

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti membahas mengenai Implikasi Yuridis Perubahan Jenis Delik pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pemilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya suatu perubahan Jenis Delik Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta dari Delik Biasa Ke Delik Aduan.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengangkat dua rumusalan masalah, yaitu sebagai berikut: (1). Bagaimana implikasi yuridis perubahan jenis delik pada Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? (2). Apakah perubahan delik tersebut sesuai dengan tujuan pengaturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

Selanjutnya penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, jenis dan sumber bahan hukum menggunakan jenis bahan hukum primer dan sekunder, sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik penelusuran bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan bahan hukum dengan melakukan penelitian di perpustakaan terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, *literature*, dokumen, pendapat pakar, jurnal, serta artikel-artikel yang dapat memperjelas konsep-konsep hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode penelitian diatas, peneliti memperoleh jawaban mengenai Implikasi Yuridis Perubahan Jenis Delik pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, dari delik biasa ke delik aduan didasarkan dari kehendak negara untuk melindungi pencipta atau pemegang hak cipta, serta kehendak negara untuk terlibat dalam pergaulan internasional dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual

Sedangkan perubahan dapat dipastikan bertujuan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik lagi dari pencapaian sebelumnya, mengurangi pelanggaran hak cipta itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan pelanggaran Hak Cipta itu sendiri dari tahun ketahun semakin meningkat, sehingga perlunya dilakukan pembenahan pada peraturan mengenai Hak Cipta.

Dalam penelitian ini peneliti menyarankan hendaknya perubahan delik memberikan kepastian hukum kepada pencipta atau pemegang hak cipta, karena dengan digantinya delik biasa menjadi delik aduan menjadikan pencipta atau pemegang semakin diakui sebagai yang berhak atau dengan kata lain pencipta atau pemegang hak cipta tidak hanya dianggap sebagai pelengkap, namun sebaiknya sanksi yang diberikan bagi pelanggaran hak cipta itu sendiri semakin dipertegas, dan atau semakin berat.

Kata Kunci: Perubahan Jenis Delik, Hak Cipta.

SUMMARY

KARTIKO YUDI PRAKOSA, Criminal Law, Faculty of Law University of Brawijaya, April 2018, "Juridical Implications on a Type Change of Crime in Law No. 28 of 2014 on Copyright". Dr. Bambang Sugiri, SH., MS, Dr Yuliati, SH.,LL.M.

In this thesis research, the researcher discusses the juridical implications on a Type Change of Crime in Law No. 28 of 2014 on Copyright. The selection of the theme is motivated by the existence of a Type change of Offense In Law Number 28 Year 2014 about copyright from Regular Crime to Crime by Complaint.

Based on this, the researcher raised two problem formula, among others: (1). What is the juridical implication of the type of crime in Law No. 28 of 2014 on Copyright? (2). Does the change of the crime is in line with the objective of regulating Law Number 28 Year 2014 regarding Copyright?

Furthermore, this research uses normative juridical research type, using normative juridical research approach, type and source of legal material using primary and secondary law type, while data source used in this research uses primary and secondary data source. The technique of tracing legal material used in this research is the technique of data analysis of library research method, which is the collection of legal materials by conducting research in the library on a number of laws and regulations, literature, documents, expert opinion, journal, and articles which can clarify legal concepts.

Based on the results of the research using the above research methods, the researcher obtained a comparison of previous UUHC regulations with the new UUHC related to Juridical Implications on a Type Change of Crime in Law No. 28 of 2014 on Copyright, from regular crime to crime by complaint based on the will of the state to protect the creator or holders of copyright, and the will of the state to engage in international association in the field of Intellectual Property Rights

While the change can certainly aim to achieve something better than previous achievements, reduce the copyright infringers themselves. This is because the copyright infringement itself is increasing from year to year, thus it is necessary to improve the regulations on Copyright.

In this research, the researcher suggest that the change of delict should give legal certainty to the creator or the copyright holder, because with the replacement of ordinary delik become the offense of complaint to make the creator or the holder increasingly recognized as the right or in other words the creator or the copyright holder is not only considered as complement, but the sanctions given to the copyright infringement itself are increasingly emphasized, and / or heavier.

Key words: Type Change of Crime, Copyright.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak cipta adalah hak yang lahir atas kreasi dari manusia, kreasi yang muncul dari olah hati dan olah pikir, atau dalam terminologi adalah hak yang lahir atas cipta, rasa dan karsa manusia. Dengan menggunakan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional yang dimiliki oleh pencipta atau *Inventor* secara khusus yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ciptaan atau invensi. Ciptaan atau *invensi* adalah hak milik material (berwujud), diatas hak milik material tersebut melekat hak milik immaterial (tak berwujud) yang berasal dari akal pemiliknya sehingga disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut sebagai HKI).

Seiring dengan banyaknya masalah mengenai pembajakan di Indonesia. Pemerintah melakukan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yaitu tentang Hak Cipta, yang selanjutnya digantikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹ Perubahan ini terdapat pada Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pembaruan peraturan tentang hak cipta tersebut terjadi karena perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga peraturan yang lama sudah tidak sesuai lagi. Terdapat beberapa perubahan yang dilakukan oleh pembentuk Undang-

¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Nomor 266 Tahun 2014).

Undang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC). Salah satunya tentang klasifikasi delik yang ada dalam UUHC. Disatu sisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 menggunakan delik biasa dalam menindak pelanggaran hak cipta. Disisi lain delik biasa yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tidak dipertahankan lagi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 melainkan menggunakan delik aduan.²

Pengertian delik biasa adalah suatu delik yang dapat dituntut tanpa membutuhkan adanya pengaduan dari pihak-pihak yang dirugikan. Delik biasa membebankan kewajiban pada aparat penegak hukum untuk aktif menindaklanjuti pelanggaran pidana. Perkara yang termasuk dalam kategori delik biasa, tidak dapat dihentikan perkaranya meskipun para pihak telah memutuskan untuk berdamai. Suatu tindak pidana dikategorikan sebagai delik biasa, apabila termasuk dalam kejahatan yang diatur dalam suatu undang-undang, dan tidak dinyatakan sebaliknya dalam undang-undang tersebut.³

Delik aduan (*klachtdelict*) adalah tindakan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena.⁴ Jadi apabila tidak ada pihak yang dirugikan dalam pelanggaran hak cipta, maka aparat penegak hukum tidak dapat menindaklanjutinya dikarenakan tidak adanya aduan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dalam hal ini semua hak kekayaan intelektual menggunakan delik aduan dalam menindaklanjuti pelanggaran karena dianggap lebih efektif. Delik

² Tomi Suryo Utomo, **Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 2.

³ *Ibid*, hlm. 4.

⁴ Teguh Prasetyo, **Hukum Pidana**, I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 59.

aduan yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ini memberikan akibat bagi aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum tidak dapat lagi berperan aktif dalam mengurangi angka pelanggaran terhadap hak cipta. Aparat penegak hukum hanya dapat bertindak setelah mendapatkan pengaduan dari pihak yang dirugikan. Berbeda pada saat UUHC nomor 19 tahun 2002 yang masih menggunakan delik biasa, aparat penegak hukum diwajibkan berperan aktif dalam mengurangi pelanggaran terhadap hak cipta. Delik aduan yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, menimbulkan konsekuensi bagi perlindungan pencipta atau pemegang hak cipta.

Perubahan sifat delik UUHC pertama kali terjadi pada UUHC 1987, yaitu dari delik aduan menjadi delik biasa. Tujuan perubahan delik untuk pertama kalinya, bila dilihat dari faktor yang mendorong perubahan, maka bertujuan untuk mengurangi pelanggaran hak cipta. Delik aduan yang digunakan oleh UUHC 1982, menyebabkan pelanggaran hak cipta mencapai pada tingkat yang membahayakan. Keadaan tersebut, menyebabkan pembuat undang-undang mengubah sifat delik aduan menjadi delik biasa. Perubahan delik yang kedua terjadi pada UUHC 2014, yaitu dari delik biasa kembali lagi pada delik aduan. Diubahnya sifat delik ini bertujuan untuk semakin menegaskan bahwa hak cipta adalah hak yang bersifat personal, yaitu hak pribadi. Sudah selayaknya hak yang bersifat pribadi tersebut, apabila terjadi pelanggaran harus ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Persoalan yang muncul dengan diubahnya delik adalah apa dengan diubahnya delik biasa menjadi

delik aduan dapat memperlemah perlindungan hukum terhadap pencipta atau pemegang hak. Pertanyaan tersebut muncul karena, pada saat Indonesia masih menggunakan delik biasa, dimana aparat penegak hukum dapat aktif menindak pelanggaran terhadap hak cipta banyak terjadi. Bagaimana dengan saat ini, dimana aparat penegak hukum tidak dapat aktif menindak pelanggaran terhadap hak cipta.

Perubahan UUHC yang dilakukan pemerintah semata-mata dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penindakan. Dikarenakan Delik biasa dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan. Padahal pelanggaran hukum seperti itu seharusnya memang diperlakukan sebagai Tindak Pidana biasa. Dengan kata lain, penindakannya tidak semata-mata didasarkan pada adanya pengaduan.⁵ Delik biasa adalah penindakan yang dapat segera dilakukan tanpa menunggu adanya pengaduan, sedangkan Delik aduan diharuskan pihak yang dirugikan mengadukan kepada kepolisian baru dapat diproses.

Selain dimaksudkan untuk melakukan tindakan preventif rusaknya tatanan pasar, penerapan delik biasa sekaligus untuk menjadi pendorong sikap dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kepatuhan dan ketaatan pada hukum. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (*art and literary*) yang didalamnya mencakup pula program komputer.

⁵ Penjelasan Angka 17, UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

Perlindungan hak cipta erat hubungannya dengan pelanggaran hak cipta. Mengingat tujuan dari perlindungan hak cipta sendiri, untuk melindungi hak-hak pencipta dari tindakan pelanggaran yang dapat merugikan pencipta atau pemegang hak cipta. Ditetapkannya delik biasa dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta 2002, dimaksudkan untuk menjamin perlindungan yang lebih baik dari sebelumnya. Undang-Undang Hak Cipta alasan delik biasa dianggap lebih baik memberikan perlindungan karena pelanggaran hak cipta dapat di perkarakan di Pengadilan secara cepat dan tidak perlu menunggu pengaduan terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta. Delik biasa memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum, untuk secara langsung menindak pelanggaran hak cipta, tanpa menunggu aduan dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pencipta atau pemegang hak cipta merasa lebih terbantu dengan adanya sikap aktif aparat penegak hukum. Sikap aktif aparat penegak hukum tersebut juga diharapkan dapat mengurangi tindakan pelanggaran hak cipta, sehingga pencipta atau pemegang hak cipta semakin terlindungi.

Delik aduan yang digunakan dalam UUHC Nomor 28 Tahun 2014 ini memberikan akibat bagi aparat penegak hukum. dan dalam hal ini aparat penegak hukum tidak dapat lagi berperan aktif dalam mengurangi angka pelanggaran terhadap hak cipta. Delik aduan yang digunakan dalam UUHC

Nomor 28 Tahun 2014, menimbulkan konsekuensi bagi perlindungan pencipta atau pemegang hak cipta.⁶

Mengenai pergeseran jenis delik tindak pidana hak cipta pada dasarnya pernah dilakukan penelitian oleh peneliti lain yaitu sebagai berikut:

No	Tahun	Nama Penelitian dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2015	Mega Silvana Kurniawati. M, Universitas ATMAJAYA Yogyakarta	Konsekuensi Perubahan Sifat Delik Pelanggaran Hak Cipta terhadap Perlindungan Pencipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.	1. Apakah Faktor yang mendorong diubahnya delik biasa menjadi delik aduan? 2. Bagaimana Konsekuensi terjadinya perubahan delik?	Perubahan delik biasa menjadi delik aduan tidak memperlemah perlindungan terhadap pencipta atau pemegang hak cipta.
2.	2016	Aan Priyatna, Universitas Diponegoro	Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta dalam Pembuatan E-Book	1. Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Cipta dalam Pembuatan <i>E-book</i> . 2. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang	Dalam Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, dimana penegakan hukumnya oleh pemerintah dengan memberikan sanksi pidana dan sanksi perdata dengan tuntutan

⁶ Yustisia, Tim Visi. **Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa**, Jakarta: Visimedia, 2015, hlm. 20.

				Ditimbulkan Apabila Seseorang Melakukan Pelanggaran Pembuatan <i>E-Book</i> .	ganti rugi.
3.	2018	Zainul Amin, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya	Penegakan Hukum terhadap Hak Cipta dalam Bidang Industri Kreatif di Negara Kesatuan Republik Indonesia	1. Mekanisme Penyidikan Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Industri Kreatif Atas Pembajakan Musik Dan/Atau Lagu Dalam Kepingan <i>Video Compact Disc/Digital Video Disc</i> 2. Penegakan Hukum Dalam Bidang Industri Kreatif Di Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kurangnya penegakan hukum sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta dalam bidang industri kreatif, oleh pengadilan terdakwa dijatuhi hukuman ringan, sehingga tidak mempunyai efek jera

Berdasarkan tabel diatas, dapat dinyatakan bahwa dalam penelitian sebelumnya para peneliti pada nomor 1 lebih menitikberatkan pada Konsekuensi Perubahan Sifat Delik Pelanggaran Hak Cipta terhadap Perlindungan Pencipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Peneliti nomor 2 menitikberatkan pada Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta dalam Pembuatan E-Book. Dan peneliti nomor 3 menitikberatkan pada Penegakan Hukum terhadap Hak Cipta dalam

Bidang Industri Kreatif di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih difokuskan pada Implikasi Yuridis Perubahan Jenis Delik pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Oleh karena itulah, penelitian yang penulis lakukan tidak sama dengan kedua penulis sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yuridis normatif dengan mengangkat judul **Implikasi Yuridis Perubahan Jenis Delik pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana implikasi yuridis perubahan jenis delik pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Apakah perubahan delik tersebut sesuai dengan tujuan pengaturan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa terjadinya Implikasi Yuridis Perubahan Jenis Delik pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa perubahan delik tersebut sesuai dengan tujuan pengaturan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta masukan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya Ilmu Hukum Pidana berkaitan dengan Hak Cipta. Yang berkaitan dengan Delik

2. Manfaat Praktis

2.1. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperoleh wawasan dan juga memahami tentang perlindungan hukum terhadap perlindungan konsumen.

2.2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah agar mengkaji kembali penetapan delik pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

2.3. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu refrensi terhadap mahasiswa ilmu hukum khususnya konsentrasi Pidana

sehingga dapat mengetahui serta menganalisa tinjauan yuridis mengenai delik pada Undang-Undang perlindungan konsumen.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat peneltian, dan tujuan penelitian yaitu Tinjauan Yuridis mengenai Implikasi Yuridis Perubahan Jenis Delik pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi tentang tinjauan umum mengenai dasar hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 definisi umum tentang delik aduan dan delik biasa, tindak pidana hak cipta.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang metode pendekatan penelitian jenis dan sumber bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisis bahan hukum dan definisi konseptual.

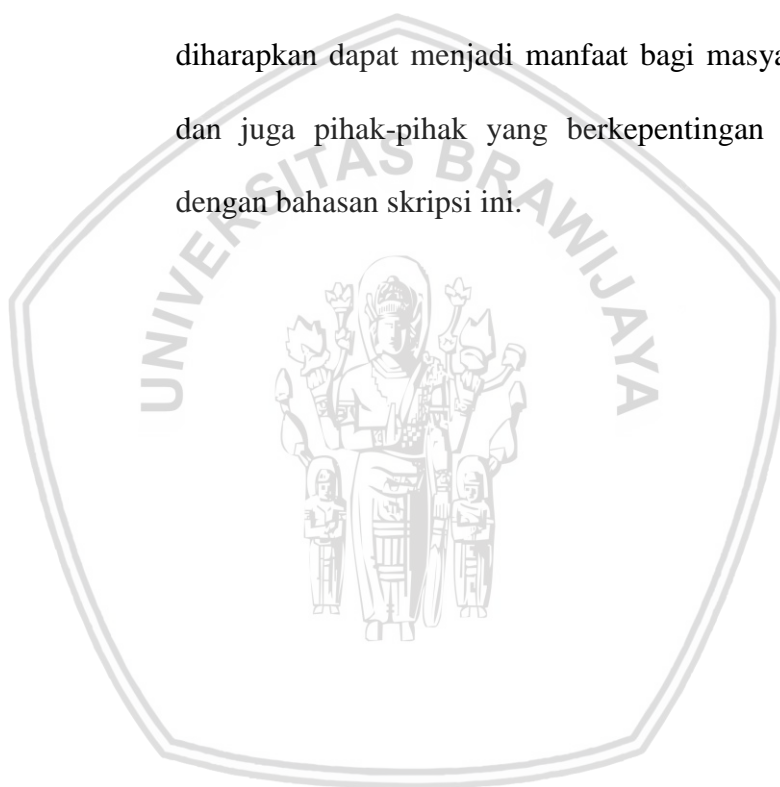
BAB IV : PEMBAHASAN

Berisi tentang deskriptif data dan pembahasan yang berisi jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil

penelitian serta hambatan-hambatan dalam kaitanya dengan Undang-Undang Hak Cipta.

BAB V :PENUTUP

Di dalam bab ini akan berisikan secara singkat tentang kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan bab-bab yang telah dijelaskan sebelumnya dan saran yang nantinya diharapkan dapat menjadi manfaat bagi masyarakat umum dan juga pihak-pihak yang berkepentingan yang terkait dengan bahasan skripsi ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia, untuk istilah dalam bahasa Belanda disebut “*strafbaarfeit*” atau “delik”. Istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.⁷

Moeljatno berpendapat:

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.⁸

Sementara perumusan *strafbaarfeit*, menurut Van Hamel, adalah sebagai berikut: “*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang

⁷ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, **Pokok-pokok Hukum Pidana**, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004, hlm. 54.

⁸ *Ibid*, hlm 56.

dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”. Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk Undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana. Maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*). Tiada ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.⁹ Dari pendapat diatas maka paling tepat digunakan adalah istilah “tindak pidana” karena mengandung istilah yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat praktis digunakan. Selain itu pemerintah diberbagai peraturan perundang-undangan memakai istilah “Tindak Pidana” contohnya mengenai peraturan Tindak Pidana Tertentu.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan

⁹ Wiryono Prodjodikoro, **Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia**, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003, hlm. 1.

keadaan-keadaan yang mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁰

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*culpa/dolus*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur-unsur objektif suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum.
- b. Kualitas si pelaku.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.¹¹

Berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarheid*) ada beberapa pendapat sarjana yaitu pengertian unsur-unsur tindak pidana

¹⁰ P.A.F Lamintang, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Cet 2, Bandung: Sinar Baru, 1990, hlm. 184-184.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 184.

menurut aliran *monistis* dan menurut aliran *dualistis*. Berikut pandangan para sarjana kedua aliran tersebut:

a. Sarjana yang berpandangan aliran *monistis* yaitu:

1) D. Simons

Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah: *Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*. Jadi unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld verband staand*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).¹²

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari *strafbaar feit* adalah:

- a) Yang dimaksud unsur subjektif adalah: perbuatan orang;

¹² Sudarto, **Hukum Pidana I A dan I B**, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 1975, hlm. 32.

- b) Akibat yang terlihat dari perbuatan itu;
- c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”.

Selanjutnya unsur subjektif dari *strafbaar feit* adalah:

- a. Orangnya mampu bertanggungjawab;
- b. Adanya kesalahan (*dolus dan culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.¹³

2) Van Hamel

Strafbaar feit adalah *een wetelijk en mensschelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten*.

Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- b) Bersifat melawan hukum;
- c) Dilakukan dengan kesalahan;
- d) Patut dipidana.¹⁴

Dua pendapat sarjana diatas dapat mewakili pendapat aliran monistis. Dari pendapat para sarjana yang beraliran *monistis*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 33.

tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*.

b. Sarjana yang berpandangan *dualistis* adalah sebagai berikut:

1) Moeljatno

Menurut Moeljatno, menyatakan bahwa untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

- a) Perbuatan oleh manusia;
- b) Memenuhi rumusan Undang-undang (syarat formil);
- c) Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.

2) W.P.J. Pompe

Menurut hukum positif *strafbaar feit* adalah tidak lain dari *feit* yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi

perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum,¹⁵ dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.

Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Menurut Soedarto kedua pendirian itu, baik aliran *monistis* maupun aliran *dualistis*, tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil dalam menentukan adanya pidana. Apabila orang menganut pendirian yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian. Bagi orang yang berpandangan *monistis*, seseorang yang melakukan tindak pidana harus dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan *dualistis*, sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. Jadi menurut pandangan *dualistis*, semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.¹⁶

B. Tinjauan Umum tentang Delik

1. Pengertian tentang Delik

Kata delik berasal dari Latin, yaitu *delictum*. Delik dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, sedangkan

¹⁵ Sudarto, **Hukum Pidana I A dan I B**, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 1990, hlm. 27.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 28.

dalam bahasa Belanda disebut *delict*¹⁷. Menurut kamus Bahasa Indonesia yang selanjutnya disebut KBBI delik diartikan sebagai peraturan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Menurut Mr Van Der Hoeven, namun tetapi pengertian delik yang terdapat dalam KBBI kurang tepat. Pendapat tersebut didasarkan pada alasan bahwa, yang dapat dihukum adalah manusianya bukan perbuatannya. Menurut rancangan KUHP Nasional unsur delik terdiri dari, unsur formil yakni perbuatan manusia, perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan, perbuatan itu oleh peraturan undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan terlarang, dan perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana. Unsur materiil yakni perbuatan itu harus bertentangan dengan hukum yaitu benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.¹⁸ Pengertian delik menurut beberapa ahli, antara lain :

1. Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.
2. Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum baik yang dilakukan sengaja maupun tidak sengaja oleh seorang yang tindakannya dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

¹⁷ Laden Marpaung, **Asas Teori Praktik Hukum Pidana**, VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 7.

¹⁸ **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76)

3. Teguh Prasetyo, delik adalah perbuatan yang melanggar hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab dan pelakunya diancam pidana.
4. Prof. Simons, mengartikan delik adalah sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
5. Achmad Ali, delik adalah pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum atau undang-undang dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu dibidang hukum privat atau hukum publik termasuk hukum pidana.
6. Andi Zainal Abidin Farid, delik adalah suatu perbuatan yang diancam pidana, melawan hukum dilakukan dengan kesalahan orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan itu.
7. Moeljato, delik adalah perbuatan pidana pidana yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Awalnya para ahli hukum membagi jenis tindak pidana ke dalam apa yang disebut *rechtdelicten* dan *wetsdelicten*. *Rechtdelicten* adalah delik-delik yang bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis, sedangkan *wetsdelicten* adalah delik-delik yang memperoleh sifatnya

sebagai tindakan-tindakan yang pantas untuk dihukum, oleh karena dinyatakan demikian di dalam peraturan undang-undang.¹⁹ KUHP sendiri membagi tindak pidana menjadi dua yaitu kejahatan (*misdiiven*) dan pelanggaran (*overtredingen*).

2. Macam-Macam Tindak Pidana

Delik merupakan bagian dari suatu Tindak Pidana, Delik secara umum dibagi menjadi bermacam-macam delik antara lain sebagai berikut:

- a. Delik kejahatan adalah rumusan delik yang biasanya disebut delik hukuman, ancaman hukumannya lebih berat.
- b. Delik pelanggaran adalah delik undang-undang yang ancaman hukumannya memberi alternative bagi setiap pelanggarannya.
- c. Delik formil yaitu delik yang selesai, jika perbuatan yang dirumuskan dalam peraturan pidana itu telah dilakukan tanpa melihat akibatnya. Contoh : delik pencurian pasal 362 KUHP, dalam pasal ini yang dilarang itu selalu justru akibatnya yang menjadi tujuan si pembuat delik.
- d. Delik materiil adalah jika yang dilarang itu selalu justru akibatnya yang menjadi tujuan si pembuat delik. Contoh : delik pembunuhan pasal 338, undang-undang hukum pidana, tidak menjelaskan bagaimana cara melakukan pembunuhan, tetapi yang disyarkan

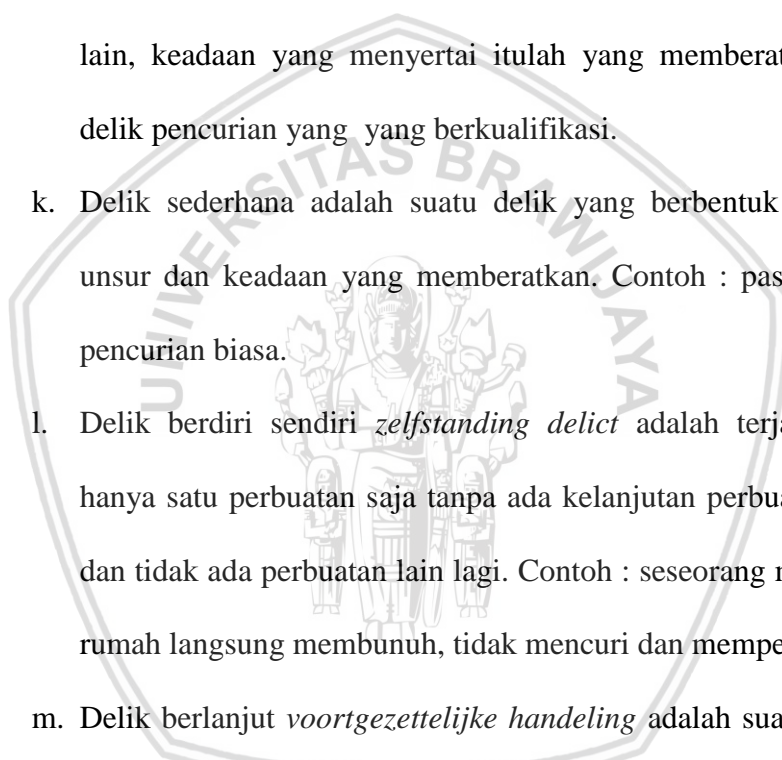
¹⁹ P.A.F Lamintang, *op. cit.* hlm. 200.

adalah akibatnya yakni adanya orang mati terbunuh, sebagai tujuan si pembuat/pelaku delik.

- e. Delik umum adalah suatu delik yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan diberlakukan secara umum. Contoh : penerapan delik kejahatan dalam buku II KUHP misalnya delik pembunuhan pasal 338 KUHP.
- f. Delik khusus atau tindak pidana khusus hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu dalam kualitas tertentu, misalnya tindak pidana korupsi, ekonomi, subversi dan lain-lain.
- g. Delik biasa adalah terjadinya sesuatu perbuatan yang tidak perlu adanya pengaduan, tetapi justru laporan atau karena kewajiban aparat negara untuk mengambil tindakan.
- h. Delik *dolus* adalah suatu delik yang dirumuskan dilakukan dengan sengaja. Secara umum, para pakar hukum pidana telah menerima adanya tiga bentuk kesengajaan yakni, kesengajaan sebagai maksud *opzet als oogmerk*, kesengajaan dengan keinsyafan pasti *opzet als zekerheidsbewuspijn*, dan kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan *dolus eventualis*. Contoh : Pasal-pasal pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain.
- i. Delik *culpa* yakni perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaiannya, kealpaannya atau korban. Pada umumnya kealpaan atau *culpa* dibedakan atas yakni, kealpaan dengan kesadaran *bewute schuld*, dan kealpaan tanpa kesadaran *onbewuste schuld*.

Contoh : seorang sopir yang menabrak pejalan kaki, karena kurang hati-hati menjalankan kendaraanya.

- j. Delik berkualifikasi adalah penerapan delik yang diperberat karena suatu keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu. Contoh : pasal 363 KUHP, pencurian yang dilakukan pada waktu malam, atau mencuri hewan atau dilakukan saat bencana alam dan lain-lain, keadaan yang menyertai itulah yang memberatkan sebagai delik pencurian yang berkualifikasi.
- k. Delik sederhana adalah suatu delik yang berbentuk biasa tanpa unsur dan keadaan yang memberatkan. Contoh : pasal 362 delik pencurian biasa.
- l. Delik berdiri sendiri *zelfstanding delict* adalah terjadinya delik hanya satu perbuatan saja tanpa ada kelanjutan perbuatan tersebut dan tidak ada perbuatan lain lagi. Contoh : seseorang masuk dalam rumah langsung membunuh, tidak mencuri dan memperkosa.
- m. Delik berlanjut *voortgezettelijke handeling* adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara berlanjut, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan.
- n. Delik komisionis adalah delik yang karena rumusan undang-undang bersifat larangan untuk dilakukan. Contoh : perbuatan mencuri, yang dilarang adalah mencuri atau mengambil barang orang lain secara tidak sah diatur dalam pasal 362 KUHP.



- o. Delik omisionis adalah delik yang mengetahui ada komplotan jahat tetapi orang itu tidak melaporkan kepada yang berwajib, maka dikenakan pasal 164 KUHP, jadi sama dengan mengabaikan suatu keharusan.
- p. Delik aduan adalah delik yang dapat dilakukan penuntutan delik sebagai syarat penyidikan dan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan/korban. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP delik aduan dibagi menjadi dua jenis yaitu, delik aduan absolut, dan delik aduan relatif. Contoh : pencurian keluarga pasal 367 KUHP, delik penghinaan pasal 310 KUHP, delik perzinahan pasal 284 KUHP.²⁰

C. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta

1. Definisi Hak Cipta

Hak Cipta diatur dan diancam berdasarkan *Auteurswet* 1912 (*Staatsblad* Nomor 600 Tahun 1912), yang berkenaan dengan penciptaan di bidang ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusastraan. Hak cipta berdasarkan *Anteurswet* 1912 merupakan Hak Mutlak.²¹ Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-

²⁰ Rachmad Baro, **Penelitian Hukum Non-Doktrinal : Penggunaan Metode & Teknik Penelitian Sosial di Bidang Hukum**, Deepublish|Publisher, Yogyakarta, 2016, hlm 77.

²¹ Leden Marpaung, **Tindak Pidana Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual** Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm. 11.

pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²² Hak cipta merupakan salah satu dari Hak Atas Kekayaan Intelektual yang ada di Indonesia. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang lahir karena hasil kemampuan atau karya cipta manusia. Jika suatu barang/produk diciptakan dari hasil kekayaan intelektual, maka pada produk tersebut melekat dua hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri si pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun.²³ Hak cipta adalah merupakan hak kekayaan yang bersifat immateriil dan merupakan hak kebendaan. Hak kekayaan immateriil ialah hak kekayaan yang objek haknya adalah benda tidak berwujud atau benda yang tidak bertubuh.

Menurut Pendapat Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan: Pengertian hak kebendaan sendiri adalah mutlak atas suatu benda yang dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Hak cipta dimana sebagai hak kebendaan memberikan dasar teoritis bahwa hak cipta dapat dipertahankan dari siapapun.²⁴

Dalam hal ini telah dibuktikan dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dimana dapat memberikan jalan, baik sanksi pidana maupun gugatan perdata yang

²² Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Nomor 85 Tahun 2002).

²³ Nurachmad, **Segala tentang HAKI Indonesia Buku Pintar Memahami Aturan HAKI Kita** Jogjakarta: Buku Biru, 2012, Hlm. 15.

²⁴ Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, **Hukum Perdata: Hukum Benda**, Yogyakarta: Liberty, Cet. IV, 1981, Hlm. 76.

fungsinya untuk mempertahankan haknya tersebut. Terdapat salah satu asas yang melekat pada hak kebendaan adalah *droit de suite*, asas kepentingan hak komersil tanpa meminta izin terlebih dahulu. Berdasarkan uraian diatas, tujuan dari perlindungan hak cipta tersebut ialah untuk melindungi hak-hak yang seharusnya diterima oleh pencipta atau pemegang hak cipta dari tindakan orang-orang yang tidak bertanggungjawab dan dapat menyebabkan kerugian terhadap pemilik hak cipta. Hak cipta, sebagai hak milik pribadi yang tidak berwujud, konsep yang mendasarkan didalam perlindungan hak cipta adalah hak cipta tidak melindungi ide-ide, gagasan-gagasan, informasi, dan atau fakta tersebut. Sejalan dengan konsep tersebut

Menurut pendapat L.J Taylor juga mengungkapkan bahwa yang dilindungi oleh hak cipta adalah ekspresi dari sebuah ide, jadi bukan melindungi gagasan-gagasan atau ide itu sendiri. Didalam pasal 2 *Agreement Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights* (TRIPS) juga menegaskan bahwa perlindungan hak cipta diberikan untuk pengungkapan ide-ide, tata cara, metode dari penggoprasian konsep matematika.²⁵

Perlindungan hak cipta sangat erat sekali hubungannya dengan pelanggaran hak cipta. Mengingat tujuan dari perlindungan hak cipta itu sendiri, untuk melindungi hak-hak pencipta dari tindakan pelanggaran yang dapat merugikan pencipta atau pemegang hak cipta. Ditetapkannya delik biasa dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, yang selanjutnya disebut UUHC 2012, yang

²⁵ Rachmadi Usman, **Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia**, PT. ALUMNI, Bandung, 2003, Hlm 112.

dimana dimaksudkan untuk menjamin perlindungan yang lebih baik dari sebelumnya. Delik pelanggaran hak cipta yang tidak dilakukan akan terus berjalan.

2. Ciri-ciri Hak Cipta

Sifat hak cipta merupakan bagian dari hak milik yang abstrak yang merupakan penguasaan atas hasil kemampuan kerja dari gagasan serta pikiran. Pemilik hak cipta bersifat eksklusif, yaitu hak yang mempunyai kemampuan untuk melahirkan hak yang baru. Jadi satu karya cipta mempunyai beberapa hak yang terikat pada satu ikatan hak seperti dalam pemakaian dan pengalihannya. Di dalam Undang undang Hak Cipta terdapat ciri utama hak cipta yaitu: ²⁶

- a). Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud. (Pasal 16 ayat 1);
- b). Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
 1. pewarisan;
 2. hibah;
 3. wakaf;
 4. wasiat;
 5. perjanjian tertulis; atau
 6. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 16 ayat 2);

²⁶ Hasbir Paserangi & Ibrahim Ahmad, **Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Komputer Dalam Hukungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs di Indonesia** Jakarta: Rabbani Press, 2011, Hlm. 27

- c). Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. (Pasal 16 ayat 3);
- d). Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 16 ayat 4).

3. Jenis Ciptaan yang Dilindungi

Dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ditetapkan ketentuan sebagai berikut:²⁷

- a. Dalam Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- 1) Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;

Buku ataupun pamphlet merupakan karya tulis yang dilindungi hak cipta. Demikian pula perwajahan (*lay out*) karya tulis lazimnya disebut *typographical arrangement*, yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis yang mencakup format, hiasan, warna, dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas.

- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;

Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan yang sejenis itu dapat dilindungi hak cipta. Hanya saja menurut konsep *common law system* hal tersebut harus diwujudkan dalam media ekspresi

²⁷ *Ibid*, hlm. 93

tertentu sehingga dapat dibaca, didengar dan dilihat. Sedangkan menurut *civil law system* tidak mensyaratkan adanya perwujudan (fiksasi) meski ceramah, kuliah, dan pidato disampaikan secara lisan, tetap dilindungi hak cipta.

- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan mencakup alat peraga, baik yang berbentuk 2 maupun 3 dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi, atau ilmu pengetahuan lain merupakan ciptaan yang dilindungi hak cipta.

- 4) Lagu dan/atau musik atau tanpa teks;

Lagu atau musik dengan dan atau tanpa teks dimaksudkan sebagai karya yang bersifat utuh sekalipun terdiri atas unsur lagu dan melodi, syair atau lirik, dan aransemen termasuk notasinya merupakan ciptaan yang dilindungi hak cipta.

- 5) Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;

Ciptaan drama musical, koreografi, pewayangan, dan pantomim termasuk ciptaan yang dilindungi hak cipta. Dalam hal ini seyogyanya termasuk scenario atau naskah pembuatan film. Akan tetapi, ciptaan ini tingkat keaslian dan kreativitasnya melibatkan

banyak pihak yang memiliki kontribusi atas pembuatan ciptaan tersebut.

- 6) Karya seni rupa dalam segala bentuk, seperti seni lukisan, gambar, ukiran, seni kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;

Seni rupa dalam segala bentuk yang meliputi seni lukisan, gambar, ukiran, seni kaligrafi, dan seni pahat, tanpa mempertimbangkan berkualitas artistic atau tidak.

- 7) Karya seni terapan;

Yang dimaksud dengan "karya seni terapan" adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk sehingga memiliki kesan estetis dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif, atau ornamen pada suatu produk.

- 8) Karya arsitektur;

Karya arsitektur yang meliputi seni gambar bangunan, seni gambar miniature, dan seni gambar maket bangunan terlepas penilaian bangunan atau model bangunan berkualitas artistik atau tidak.

- 9) Peta;

Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu meski derajat keaslian patut dipertanyakan.

- 10) Karya seni batik atau seni motif lain;

Seni batik yang dibuat secara konvensional dilidungi sebagai bentuk

hak ciptaan tersendiri. Batik sebagai karya yang memiliki nilai seni, baik pada ciptaan motif, gambar, maupun komposisi warnanya. Disamakan dengan batik adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia seperti seni songket, ikat, dan lain-lain.

11) Karya fotografi;

Untuk ciptaan fotografi atau sejenis, tetapi bukan film dapat dilindungi hak cipta asalkan memenuhi persyaratan keaslian.

12) Potret;

13) Karya sinematografi;

Karya sinematografi film diartikan sebagai karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video atau jenis bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran proses kimiawi, proses elektronik atau proses lainnya dengan atau tanpa suara yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan atau lainnya.

14) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi,

arasean, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, arasean, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi merupakan hasil pengalihwujudan misalnya patung menjadi lukisan

atau novel menjadi film merupakan ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta.

- 15) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- 16) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- 17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- 18) Permainan video; dan
- 19) Program Komputer.

4. Sejarah Perkembangan Hak Cipta di Indonesia

Pertama kali peraturan hak cipta yang berlaku ketika Indonesia merdeka adalah *Auteurswet 1912 Staatsblad* Nomor 600 Tahun 1912, peraturan tersebut merupakan peraturan peninggalan zaman penjajahan Belanda dan diberlakukan sesuai dengan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, bahwa sebelum dibentuk peraturan baru maka peraturan-peraturan yang lama masih tetap diberlakukan. *Auteurswet 1912* pada pokoknya mengatur perlindungan hak cipta terhadap ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Negara Indonesia baru mempunyai peraturan hak cipta nasional setelah 37 Tahun Merdeka yaitu dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 6 Tahun

1982 tentang Hak cipta. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 maka *Auterswet* 1912 dinyatakan tidak berlaku lagi.²⁸

Setelah lima tahun berjalan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 karena semakin meningkatnya pelanggaran hak cipta yang dapat membahayakan kehidupan sosial dan menghancurkan kreativitas masyarakat. Kemudian Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 diubah lagi menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 Perkembangan di bidang perdagangan dan industri telah berubah sedemikian pesatnya sehingga diperlukan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak terkait, maka untuk menjawab perkembangan tersebut diperlukan perubahan kembali Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002.²⁹ Dua belas tahun kemudian dilakukan perubahan untuk penyempurnaan tentang perlindungan hak cipta dengan memasukan ketentuan perlindungan ekspresi budaya tradisional sehingga dikeluarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang dipakai saat ini.

Oleh karena itu penyempurnaan-penyempurnaan kerangka hukum yang berhubungan dengan hak cipta serta tindakan meratifikasi konvensi-konvensi internasional yang berhubungan dengan hak cipta yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia, dikarenakan

²⁸ Gatot Supromo , **Hak Cipta dan Aspek - Aspek Hukumnya** , Rineka Cipta , Jakarta, 2010, hlm.5.

²⁹ Djamal, 2009, **Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia**, Pustaka Rema Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 6.

adanya keinginan dari Indonesia selaku anggota *World Trade Organisation* (WTO) untuk memaksimalkan perlindungan hak cipta di Indonesia sebagai hak eksklusif yang harus mendapatkan perlindungan yang eksklusif pula.

Akan tetapi sekalipun improvisasi kerangka hukum dibidang hak cipta mulai mempunyai pengaruh terhadap perlindungan hak cipta di Indonesia, namun dalam penerapannya dilapangan masih jauh dari harapan (*Law In Book* tidak sesuai dengan *Law In Action*). Hal ini dikarenakan kerangka hukum yang bertujuan menjamin pengakuan dan perlindungan terhadap hak cipta ini ternyata tidak berjalan dan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan maksud yang sesungguhnya dari makna pengakuan dan perlindungan hak cipta itu sendiri.

Selanjutnya yaitu mengenai masalah kerangka hukum pengakuan dan perlindungan hak cipta itu sendiri sehingga diharapkan akan dapat menemukan benang merah dari permasalahan pelanggaran hak cipta ini, yang mana hal ini diharapkan kerangka hukum pengakuan dan perlindungan hak cipta tersebut dapat benar-benar memaksimalkan peranannya dalam melindungi pencipta, pemegang cipta dan hak terkait khususnya serta negara pada umumnya.

5. Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Hak Cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, memiliki 4 prinsip, yaitu:

1. Prinsip Keadilan

Pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi ataupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, yang disebut dengan hak.

2. Prinsip Ekonomi

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Maksudnya bahwa kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu suatu keharusan untuk menunjang kehidupannya di masyarakat. Dengan demikian, Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikan tersebut seseorang akan mendapatkan keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran *royalty* dan *technical fee*.

3. Prinsip Kebudayaan

Konsep bahwa karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk

memungkinkannya hidup. Selanjutnya, dari karya itu akan timbul suatu gerak hidup yang menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan konsepsi demikian maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, dan cipta manusia yang dibakukan dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan dari perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan atau penemuan baru.

4. Prinsip Sosial

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain yang sama-sama terikat dalam satu ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian, hak apa pun yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada perseorangan, persekutuan, atau kesatuan lain, tidak boleh diberikan untuk kepentingan perseorangan, persekutuan, atau kesatuan itu saja, tetapi juga pemberian hak kepada perseorangan, persekutuan, dan kesatuan itu diakui oleh hukum. Hal ini disebabkan dengan diberikannya hak tersebut kepada perseorangan,

persekutuan, ataupun kesatuan hukum itu, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.

Ide dasar sistem Hak Cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku pada Ciptaan yang telah mewujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar atau dibaca. Dengan gambaran seperti itu menunjukkan bahwa Hak Cipta mempunyai syarat substansif, yaitu originalitas, kreativitas, dan fiksasi. Suatu karya dapat dikatakan memiliki unsur originalitas dan merupakan suatu bentuk kreativitas jika merupakan hasil kreasi sendiri walaupun bisa saja terinspirasi dari karya orang lain. Adapun elemen fiksasi mengandung maksud suatu karya berhak mendapatkan Hak Cipta apabila telah tertuang dalam bentuk nyata bukan dalam bentuk suatu ide.³⁰

6. Dasar Hukum Hak Cipta

Pengertian dari Hak Cipta diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di Indonesia, Hak Cipta diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Undang-Undang

³⁰ Djumhana dan Djubaedillah, **Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 21.

Hak Cipta mengatur Hak Cipta dan Hak Terkait. Hak yang tergolong ke dalam Hak terkait diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi: Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi:

- a. hak moral Pelaku Pertunjukan;
- b. hak ekonomi Pelaku Pertunjukan;
- c. hak ekonomi Produser Fonogram; dan
- d. hak ekonomi Lembaga Penyiaran.³¹

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, di Indonesia berlaku Undang-Undang Hak Cipta sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Di samping Undang-Undang Hak Cipta, terdapat konvensi internasional yang mengatur tentang perlindungan Hak Cipta, yaitu:

1) *Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPS)*

TRIPs memiliki 2 tujuan umum yang fundamental, yaitu:

- a) Mengurangi distorsi dan hal-hal yang menyulitkan kemajuan bagi perdagangan internasional (*to reduce distortions*

³¹ *Ibid*, hlm 22.

impediments to international trade) yang menyangkut Hak Kekayaan Intelektual termasuk Hak Cipta.

b) Melindungi hak-hak pribadi (*to protect private property right*) pencipta.³²

2) Konvensi Berne

Konvensi Berne 1886, yaitu *Convention for the Protection of Literary and artistic Work*, ditandatangani di Swiss. Konvensi ini mengalami beberapa kali revisi, yaitu di Paris (1886), Berlin (1908), penyempurnaan di Berne (1914), revisi Roma (1928), Brussels (1948), Stockholm (1967), dan Paris (1971), serta diamandemenkan pada tahun 1979. Tiga prinsip dasar yang dianut Konvensi Berne, yaitu:

1. Prinsip National Treatment

Ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian (yaitu ciptaan seorang warga negara peserta perjanjian, atau suatu ciptaan yang pertama kali diterbitkan di salah satu negara peserta perjanjian) harus mendapatkan perlindungan hukum Hak Cipta yang sama seperti diperoleh ciptaan seorang warga negara sendiri.

2. Prinsip Automatic Protection

Pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun (*must not be conditional upon compliance with any formality*)

³² *Ibid*, hlm 23.

3. Prinsip Independence of Protection

Suatu perlindungan hukum terhadap suatu Ciptaan diberikan tanpa harus bergantung pada pengaturan perlindungan hukum negara asal Pencipta.³³

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Hak Cipta

Barang-barang yang diproduksi palsu dan dijual ke pasar, selain merugikan bagi penerimaan royalti para pencipta juga mengurangi pendapatan pajak negara dan penurunan kualitas barang yang dapat dinikmati oleh masyarakat konsumen. Kerugian ini jelas harus ditanggulangi dengan melakukan penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta tersebut sehingga dapat tercipta perlindungan yang diharapkan oleh semua pihak, terutama para pencipta/pemegang izin. Daya kreatif dan inovatif para pencipta akan mengalami penurunan, jika pelanggaran hak cipta terus berlangsung tanpa ada penegakan hukum yang memadai dengan menindak para pelakunya. Negara melalui aparat penegak hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung harus bertanggung jawab dengan adanya peristiwa ini dengan berupaya keras melakukan penanggulangan merebaknya pelanggaran hak cipta. Apabila tidak ada penegakan hukum yang konsisten terhadap para pelanggar, maka akan sulit terwujudnya suatu perlindungan hukum terhadap hak cipta yang baik. Masalah ini telah menjadi tuntutan masyarakat internasional terhadap

³³ Rahmi Jened, **Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 59.

bangsa dan negara Indonesia yang dinilai masih rendah untuk menghargai HKI.³⁴

1. Pengaturan Standar Minimum Perlindungan Hak Cipta

Pengaturan standar minimum perlindungan hukum atas ciptaan-ciptaan, hak-hak pencipta dan jangka waktu perlindungan dalam Konvensi Bern adalah sebagai berikut. Pertama, ciptaan yang dilindungi adalah semua ciptaan di bidang sastra, ilmu pengetahuan dan seni dalam bentuk apa pun perwujudannya. Kedua, kecuali jika ditentukan dengan cara reservasi, pembatasan atau pengecualian yang tergolong sebagai hak-hak eksklusif seperti (a) hak untuk menerjemahkan, (b) hak mempertunjukkan di muka umum ciptaan drama musik dan ciptaan musik, (c) hak mendeklamasikan di muka umum suatu ciptaan sastra, (d) hak penyiaran, (e) hak membuat reproduksi dengan cara dan bentuk perwujudan apa pun, (f) hak menggunakan ciptaannya sebagai bahan untuk ciptaan, dan (g) hak membuat aransemen dan adaptasi dari suatu ciptaan. Selain hak-hak eksklusif di atas, Konvensi Bern juga mengatur sekumpulan hak yang dinamakan dengan hak-hak moral (*moral rights*).³⁵

Hak moral adalah hak pencipta untuk mengklaim sebagai pencipta atas suatu hasil ciptaan dan hak pencipta untuk mengajukan keberatan-keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud untuk mengubah, mengurangi atau menambah keaslian ciptaan, yang akan dapat meragukan kehormatan dan reputasi pencipta pertama. Hak moral seorang pencipta

³⁴ OK, Saidin, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 118.

³⁵ *Ibid*, hlm 119.

menurut pendapat A. Komen dan D.WS Verkade mengandung empat makna. Pertama, hak untuk melakukan atau tidak melakukan pengumuman ciptaannya. Kedua, hak untuk melakukan perubahan-perubahan yang dianggap perlu atas ciptaannya, dan hak untuk menarik dari peredaran ciptaan yang telah diumumkan kepada publik. Ketiga, hak untuk tidak menyetujui dilakukannya perubahan-perubahan atas ciptaannya oleh pihak lain. Keempat, hak untuk mencantumkan nama pencipta, hak untuk tidak menyetujui setiap perubahan atas nama pencipta yang akan dicantumkan, dan hak untuk mengumumkan sebagai pihak pencipta setiap waktu yang diinginkan. Hak ini mempunyai kedudukan sejajar dengan hak ekonomi yang dapat dimiliki seorang pencipta atas suatu hasil ciptaannya.³⁶

UUHC Nomor 19 Tahun 2002 mengatur jenis-jenis perbuatan pelanggaran dan ancaman hukumannya, baik secara perdata maupun pidana. Undang-Undang ini memuat sistem deklaratif, yaitu perlindungan hukum hanya diberikan kepada pemegang/pemakai pertama atas hak cipta. Apabila ada pihak lain yang mengaku sebagai pihak yang berhak atas hak cipta, maka pemegang/pemakai pertama harus membuktikan bahwa dia sebagai pemegang pemakai pertama yang berhak atas hasil ciptaan tersebut. Sistem deklaratif ini tidak mengharuskan pendaftaran hak cipta, namun pendaftaran pada pihak yang berwenang (cq Ditjen Hak Kekayaan

³⁶ Sumandar, Haris. , & Sitanggang, Sally, **Mengenal Hak Kekayaan Intelektual**, Esensi : Jakarta, 2008, hlm 84.

Intellectual Depkeh RI) merupakan bentuk perlindungan yang dapat memberikan kepastian hukum atas suatu hak cipta.³⁷

2. Perlindungan Hukum Hak Cipta

Perlindungan hukum terhadap hak cipta dibatasi dengan masa berlaku Hak Moral pasal 57 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi;

(1) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

huruf a,

huruf b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu.

(2) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

huruf c

dan huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan.

Sedangkan masa berlaku hak cipta sebagaimana diatur dalam pasal 58 ayat (1), (2) dan (3). Yang berbunyi³⁸

(1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;

b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;

c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan

³⁷ *Ibid*, hlm 86.

³⁸ *Ibid*, hlm 108.

pantomim;

f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;

g. karya arsitektur;

h. peta; dan

i. karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup

Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

(2). Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

(3) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Apabila terbukti terjadi pelanggaran hak cipta, maka akan dilakukannya upaya hukum yang tertuang dalam pasal 102, 103, 104, 105 Undang-Undang hak Cipta Nomor 28 tahun 2014.

3. Aparat Penyidik dalam Pelanggaran Hak Cipta

Aparat penyidik dalam pelanggaran hak cipta ditentukan berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain. Dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 8 Tahun 1981 tercantum dua penyidik yakni pejabat polisi negara Republik Indonesia dan atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Mereka bertugas bersama aparat negara tertentu yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Untuk menyelidiki apakah sudah terjadi suatu pelanggaran hak cipta, maka Pasal 71 UU No. 19 Tahun 2002 mengatur tentang penyidik yang dapat melakukan penegakan hukum. Menurut ketentuan pasal tersebut, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Departemen Kehakiman Republik Indonesia dapat diberikan wewenang khusus sebagai penyidik seperti dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat 1 b UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hak Cipta, yakni “pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk bertugas melakukan penyidikan tindak pidana di bidang hak cipta. Mereka ini dapat bertugas sebagai pejabat penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan wewenang tertentu.”³⁹

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 110 ayat (1) menjelaskan bahwa Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik

³⁹ *Ibid*, hlm 109.

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Hak Cipta dan Hak Terkait.

4. Kewenangan Penyidik dalam Menangani Pelanggaran Hak Cipta

Penyidik dalam Pasal 110 ayat (2) mempunyai wewenang melakukan tindakan berupa:

- a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- b. pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- c. permintaan keterangan dan barang bukti dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- f. penyitaan dan/atau penghentian peredaran atas izin pengadilan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

- g. permintaan keterangan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- h. permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
- i. penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.⁴⁰

5. Kewajiban Penyidik dalam Menangani Pelanggaran Hak Cipta

Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS mempunyai kewajiban dalam empat hal, yaitu:

- a. Memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penyidik Pejabat Polisi Negara tentang dimulainya penyidikan;
- b. memberitahukan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara tentang perkembangan penyidikan yang dilakukan;
- c. meminta petunjuk dan bantuan penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara sesuai dengan kebutuhan;
- d. memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penyidik Pejabat Polisi Negara apabila penyidikan akan dihentikan karena alasan tertentu yang dibenarkan oleh hukum. Keempat kewajiban dari PPNS itu

⁴⁰ *Ibid*, hlm 110.

saling terkait dan terukur dalam rangka untuk mengungkapkan suatu pelanggaran hak cipta di tanah air.⁴¹

Semua kewajiban di atas bagi PPNS menjadi dasar untuk melaksanakan tugasnya dalam melakukan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran hak cipta. Akan tetapi PPNS tidak diberi kewajiban atau wewenang untuk melakukan penangkapan dan atau penahanan berdasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 04. PW. 07. 03 Tahun 1988. Tujuannya adalah agar tugas PPNS tidak tumpang tindih dengan tugas penegak hukum kepolisian dalam rangka penyidikan pelanggaran hak cipta.

6. Prosedur Penanganan Pelanggaran Hak Cipta

Prosedur Penangan Pelanggaran Hak Cipta berupa Penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh PPNS wajib didasarkan pada surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri di tempat terjadinya tindak pidana atau di tempat yang banyak ditemukan barang bukti pelanggaran hak cipta. Permohonan surat izin penyitaan harus diketahui oleh Kepala Kantor Departemen Kehakiman setempat dan tembusannya dikirimkan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara.⁴² Berdasarkan ketentuan pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa selain penyidik kepolisian, PPNS tertentu yang berwenang memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud

⁴¹ O.C.Kaligis, **Teori-Praktik Merek dan Hak Cipta**, Penerbit P.T Alumni, Bandung, 2012, hlm 211

⁴² *Ibid*, hlm 217.

dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Hak Cipta dan Hak Terkait.

Oleh karena itu, dalam melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pejabat pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal melakukan tindakan sebagaimana diatur pada ayat 2 (dua) huruf e dan huruf f Penyidik Pegawai Negeri Sipil meminta bantuan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. .⁴³

7. Sistem Perlindungan Hak Cipta

Di dunia terdapat dua teori yang menjadi dasar filosofi negara dalam melindungi Hak Cipta, yaitu teori yang dikemukakan oleh John Locke yang berpengaruh di negara penganut tradisi hukum Common Law System dan teori yang dikemukakan Hegel, yang berpengaruh di negara penganut tradisi hukum Civil Law System. Di negara penganut Common Law System, perlindungan Hak Cipta dipengaruhi oleh John Locke yang mengajarkan konsep kepemilikan (property) kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (Human Rights) dengan pernyataanya: "Life, liberty, and

⁴³ *Ibid*, hlm 201.

property”. John Locke menyatakan bahwa manusia harus memperoleh buah atas jerih payah atau upayanya, tidak peduli apapun bentuk upayanya. Tradisi Common Law System disebut functionalist justification, sebagai suatu sistem incentive bahwa perlindungan Hak Cipta sebagai suatu instrumen ekonomi untuk meningkatkan pengetahuan dan mendukung perkembangan sosial ekonomi. Sistem perlindungan Hak Cipta berdasarkan teori John Locke bertitik tolak pada objeknya yaitu Ciptaan. Sehingga Ciptaan harus selalu ada perwujudannya (fixation), sedangkan unsur keaslian (originality) dan kreativitas (creativity) dengan derajat yang tidak terlalu tinggi. Tradisi Common Law System hanya mengenal Hak Ekonomi (economic right), sedangkan Hak Moral (moral right) sedang didiskusikan.⁴⁴

Di negara penganut Civil Law System, perlindungan Hak Cipta dipengaruhi oleh teori G.W. Friedrich Hegel yang mengembangkan konsep tentang “right, ethic, and state” yang intinya sebagai eksistensi dari kepribadian (the existence of personality). Tradisi hukum Civil Law disebut Natural Right Justification, dimana titik tolak perlindungan Hak Cipta diberikan kepada Pencipta selaku orang yang memiliki intellectual personal creation. Ciptaan sebagai intellectual personal creation mensyaratkan unsur keaslian (originality) dan kreativitas (creativity) dengan derajat yang sangat tinggi dan tidak semata-mata mendasar pada unsur perwujudan (fixation). Perlindungan hukum diberikan kepada

⁴⁴ Rahmi Jened, **Hukum Hak Cipta (Copyright’s Law)**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm. 23.

Pencipta sehingga Pencipta diberikan Hak Eksklusif. Hak Eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta hanya dimaksudkan bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu, kecuali dengan izin Pencipta. Perlindungan Hak Cipta di negara Civil Law Sytem mencakup Hak Moral (moral right) dan Hak ekonomi (economic right).⁴⁵

Di negara Indonesia sebagai penganut Civil Law System, maka Undang-Undang Hak Cipta dalam pembentukannya bertitik tolak dari Pencipta. Di Indonesia perlindungan Hak Cipta hanya diberikan pada suatu karya cipta yang telah memiliki bentuk yang khas (*material form*), bersifat pribadi, menunjukkan keasliannya yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian (*mental effort*) sehingga berwujud sebagai ciptaan yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Tidak seperti rezim HKI lainnya, Hak Cipta lahir secara otomatis, terlepas apakah karya tersebut didaftarkan ke Kantor Hak Cipta atau tidak (tidak harus didaftarkan).⁴⁶ Perlindungan Hak Cipta terhadap Ciptaan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 berlaku secara otomatis sejak suatu Ciptaan diumumkan, hal ini tercantum dalam Pasal 59 ayat (1) yang berbunyi: berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman. Perlindungan atas Ciptaan dapat dilakukan melalui pencatatan Ciptaan, hal ini tercantum dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi:

⁴⁵ *Ibid*, Hlm 24

⁴⁶ Akham Subroto dan Suprapedi, **Pengenalan HKI**, Indeks, Jakarta, 2008, Hlm. 36.

- (1) Menteri menyelenggarakan pencatatan dan penghapusan Ciptaan dan produk Hak Terkait.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁴⁷ Adapun Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah **penelitian yuridis normatif**. Penelitian hukum normatif tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum.⁴⁸ Penelitian yuridis normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum sosial.⁴⁹

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif ini dilakukan dengan upaya menelaah buku-buku, jurnal-jurnal, makalah yang berkaitan dengan objek yang diteliti.⁵⁰ Oleh karena itulah, pendekatan yang digunakan oleh peneliti ialah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah

⁴⁷Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 2012, hlm.43.

⁴⁸Soerjono Soekantodan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)**, RajawaliPers, Jakarta, 2001, hlm.14.

⁴⁹Johnny Ibrahim, **Teoridan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2012, hlm. 57.

⁵⁰Soerjono Soekanto, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)**, C.V. Rajawali, Jakarta, 1990, hlm.36

semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani,⁵¹ yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Implikasi Yuridis Perubahan Jenis Delik pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya diperlukan sumber-sumber hukum penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁵²

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas atau dapat diartikan sebagai bahan hukum yang digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini.⁵³ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (pasal 19);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (pasal 120);

⁵¹Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum (Edisi Revisi)**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm.133.

⁵²Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.181.

⁵³*Ibid.*, hlm 141.

2. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁵⁴

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penelusuran bahan hukum dalam penelitian skripsi ini dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan bahan hukum dengan melakukan penelitian di perpustakaan terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, *literature*, dokumen, pendapat pakar, jurnal, serta artikel-artikel yang dapat memperjelas konsep-konsep hukum. Teknik penelusuran bahan hukum ini dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Melakukan rujukan penelusuran kepustakaan untuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dari berbagai sumber, diantaranya yaitu:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya;
2. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
3. Perpustakaan Umum Kota Malang;

⁵⁴ *Ibid.*

4. Koleksi Pribadi Penulis, dan
5. *Browsing* melalui internet.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum dimulai dengan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum terhadap kasus-kasus hukum yang konkrit. Seluruh bahan hukum yang diperoleh dikumpulkan secara lengkap, selanjutnya disistematisasikan untuk dilakukan analisis. Analisis bahan hukum dilakukan dengan membandingkan Undang-undang lama dengan Undang-Undang yang baru, sedangkan pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵⁵ Pendekatan Perundang-Undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari dan meneliti kesesuaian antar Peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁵⁶

F. Definisi Konseptual

Definisi konseptual yang dipakai peneliti adalah kata kunci dari penelitian yang didasarkan kepada objek dan tema penelitian yang diangkat, diantaranya adalah :

⁵⁵*Ibid.* hlm. 181

⁵⁶*Ibid.* hlm. 132.

1. Hukum Hak Cipta

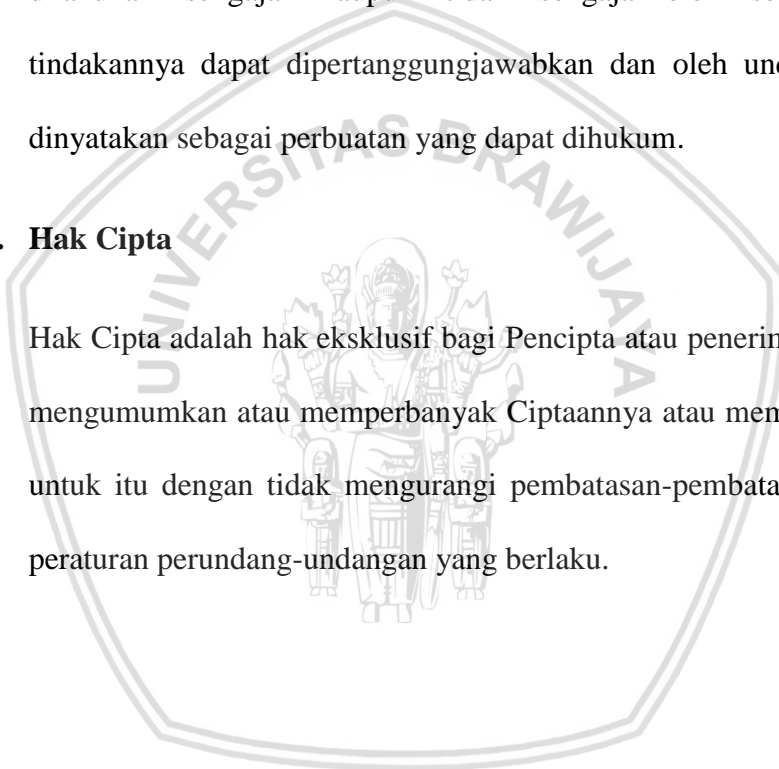
Hukum Hak Cipta adalah Hukum yang mengatur siapa pemilik atau pencipta dari suatu Ciptaan.

2. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum baik yang dilakukan sengaja maupun tidak sengaja oleh seorang yang tindakannya dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

3. Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Sifat Tindak Pidana terhadap Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia

1. Perkembangan Sifat Tindak Pidana

Pada saat menghadapi problem pembajakan karya cipta yang meluas di Indonesia. Pemerintah melakukan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yaitu tentang Hak Cipta, yang selanjutnya digantikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁵⁷ Perubahan ini terdapat pada Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pembaruan peraturan tentang hak cipta tersebut terjadi karena perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga peraturan yang lama sudah tidak sesuai lagi. Terdapat beberapa perubahan yang dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang Hak Cipta selanjutnya disebut UUHC. Salah satunya tentang klasifikasi delik yang ada dalam UUHC. Disatu sisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 menggunakan delik biasa dalam menindak pelanggaran hak cipta. Disisi lain delik biasa yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tidak dipertahankan lagi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.⁵⁸

⁵⁷Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Nomor 266 Tahun 2014).

⁵⁸ Tomi Suryo Utomo, **Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 2.

Pengertian delik biasa adalah suatu delik yang dapat dituntut tanpa membutuhkan adanya pengaduan. Delik biasa membebaskan kewajiban pada aparat penegak hukum untuk aktif menindaklanjuti pelanggaran pidana. Perkara yang termasuk dalam kategori delik biasa, tidak dapat dihentikan perkaranya meskipun para pihak telah memutuskan untuk berdamai. Suatu tindak pidana dikategorikan sebagai delik biasa, apabila termasuk dalam kejahatan yang diatur dalam suatu undang-undang, dan tidak dinyatakan sebaliknya dalam undang-undang tersebut.⁵⁹

Delik aduan (*klachtdelict*) adalah tindakan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena.⁶⁰ Sekarang ini semua hak kekayaan intelektual menggunakan delik aduan dalam menindak pelanggaran. Delik aduan yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ini memberikan akibat bagi aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum tidak dapat lagi berperan aktif dalam mengurangi angka pelanggaran terhadap hak cipta. Aparat penegak hukum hanya dapat bertindak setelah mendapatkan pengaduan dari pihak yang dirugikan. Berbeda pada saat UUHC masih menggunakan delik biasa, aparat penegak hukum diwajibkan berperan aktif dalam mengurangi pelanggaran terhadap hak cipta. Delik aduan yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, menimbulkan konsekuensi bagi perlindungan pencipta atau pemegang hak cipta.

⁵⁹ *Ibid*, hlm 4.

⁶⁰ Teguh Prasetyo, **Hukum Pidana**, I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 59.

Perubahan UUHC yang dilakukan pemerintah semata-mata dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penindakan. Hal tersebut disebabkan karena delik biasa dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan. Padahal pelanggaran hukum seperti itu seharusnya memang diperlakukan sebagai Tindak Pidana biasa. Dengan kata lain, penindakannya tidak semata-mata didasarkan pada adanya pengaduan.⁶¹ Delik biasa adalah penindakan dapat segera dilakukan tanpa menunggu adanya pengaduan, sedangkan delik aduan diharuskan pihak yang dirugikan mengadukan kepada kepolisian baru dapat diproses.

Selain dimaksudkan untuk melakukan tindakan preventif rusaknya tatanan pasar, penerapan delik biasa sekaligus untuk menjadi pendorong sikap dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kepatuhan dan ketaatan pada hukum. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (*art and literary*) yang didalamnya mencakup pula program komputer.⁶²

Perlindungan hak cipta erat hubungannya dengan pelanggaran hak cipta. Mengingat tujuan dari perlindungan hak cipta sendiri, untuk melindungi hak-hak pencipta dari tindakan pelanggaran yang dapat merugikan pencipta atau pemegang hak cipta. Ditetapkannya delik biasa dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta 2002, dimaksudkan untuk menjamin perlindungan yang lebih baik dari sebelumnya. Undang-Undang Hak Cipta alasan delik biasa dianggap lebih

⁶¹ Penjelasan Angka 17, UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

⁶² Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, Hlm 60

baik memberikan perlindungan karena pelanggaran hak cipta dapat di perkarakan di Pengadilan secara cepat dan tidak perlu menunggu pengaduan terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta. Delik biasa memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum, untuk secara langsung menindak pelanggaran hak cipta, tanpa menunggu aduan dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pencipta atau pemegang hak cipta merasa lebih terbantu dengan adanya sikap aktif aparat penegak hukum. Sikap aktif aparat penegak hukum tersebut juga diharapkan dapat mengurangi tindakan pelanggaran hak cipta, sehingga pencipta atau pemegang hak cipta semakin terlindungi.

UUHC 2014 tidak lagi mempertahankan delik biasa, terkait pelanggaran hak cipta. Delik aduan yang digunakan dalam UUHC 2014, membatasi ruang gerak aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti pelanggaran hak cipta. Hal ini disebabkan karena delik aduan tidak memberikan kewenangan bagi aparat penegak hukum untuk langsung melakukan tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hak cipta. Delik aduan sangat mungkin meningkatkan pelanggaran terhadap hak cipta, karena pelanggaran hak cipta hanya dapat ditindaklanjuti setelah adanya aduan dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hanya menunggu pengaduan dari pencipta atau pemegang hak cipta, tentunya akan memberikan kesempatan bagi pelanggaran hak cipta yang tidak diadukan terus berjalan. Berdasarkan pemaparan maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor yang mendorong perubahan delik biasa menjadi delik

aduan, dan untuk mengetahui dampak perubahan tersebut bagi perlemahan perlindungan hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta.

2. Mekanisme Pelanggaran Hak Cipta

Niat baik saja dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak akan cukup melindungi pencipta jika penciptanya itu sendiri tidaklah tahu bagaimana memperjuangkan hak-haknya tersebut. Hal ini terjadi, karena keterbatasan pencipta tentang mekanisme hukum yang dapat dilakukannya jika terjadi perbuatan pelanggaran ketentuan Pasal 112-120 UUHC. Harus diakui UUHC yang baru dengan sangat jelas telah mengatur jalur-jalur hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta yaitu dengan melakukan gugatan perdata (Pasal 96, 98 dan 99), laporan pidana (Pasal 105 juncto 110), penetapan sementara pengadilan (Pasal 106-109) dan Arbitrase (Pasal 95) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan empat pengaturan itu, seharusnya perlindungan hukum pencipta di dalam memperjuangkan hak-haknya tidak lagi menghadapi kendala.

Dapat dipahami bahwa di dalam tataran praktis-operasional tidak mudah memperjuangkan hak-hak pencipta. Untuk mempermudah perjuangan ini, maka pencipta dapat mempelajarinya keempat mekanisme hukum yang tersedia menurut UUHC sebagai pengetahuan menghadapi pelanggaran hak cipta yang merugikannya. Untuk lebih jelas di bawah ini disampaikan penjelasannya.

a) Gugatan Perdata

Yang dimaksud dengan gugatan ini mengandung dua cara yang dapat dilakukan pencipta. Pertama, pencipta berhak melakukan pembatalan pencatatan ciptaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini mengandung arti bahwa pihak yang mencatatkan tidak berhak dan tindakan itu telah dilakukannya secara bertentangan dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pencipta yang sah secara hukum (Pasal 1 ayat [2] UUHC No. 28 Tahun 2014) adalah subjek yang berhak menuntut pembatalan pencatatan kepada Pengadilan Niaga. Hal ini karena pencipta yang sah menuntut keadilan meskipun yang telah tercatat adalah pihak yang tidak berhak. Melalui ketentuan ini hukum membuka kemungkinan pembatalannya, sehingga terpenuhilah unsur keadilan. Kedua, pencipta dengan melalui ahli warisnya berhak menuntut ganti rugi (Pasal 96 UUHC No. 28 Tahun 2014). Ganti rugi yang dimaksud berupa pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait. Pembayaran ganti rugi kepada pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait dibayarkan paling lama enam bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Di samping itu juga, ahli waris berhak menggugat setiap orang yang telah dengan sengaja dan

tanpa hak dan tanpa persetujuan pencipta yang melanggar hak moral (Pasal 98 UUHC No. 28 Tahun 2014). Hal moral ilanggar dengan cara tidak mencantumkan nama pribadi pencipta yang telah meninggal dunia, sehingga pihak yang beritikad buruk itu telah terbukti melanggar Pasal 5 UUHC No. 28 Tahun 2014.

b) Laporan Pidana

Pencipta juga berhak melaporkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak atas karya ciptanya sebagai pelaku tindak pidana kepada Kepolisian RI. Hal ini sesuai dengan Pasal 105 UUHC No. 28 Tahun 2014 yang menentukan bahwa hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait tidak mengurangi hak pencipta dan/atau pemilik hak terkait untuk menuntut secara pidana. Dengan dasar inilah, maka ruang untuk memperkarakan secara pidana memang terbuka menurut UUHC dan hal itu dapat dilakukan karena tindak pidana hak cipta itu merupakan delik aduan (Pasal 120 UUHC No. 28 Tahun 2014) yang dengan ketentuan itu bahwa suatu delik hak cipta hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan (dalam hal ini Pencipta). Delik aduan sifatnya pribadi, yang memiliki syarat utama yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Dengan demikian, maka ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini bergantung pada persetujuan dari yang dirugikan/korban/orang yang ditentukan oleh UU. Oleh karena itu di dalam mekanisme ini pencipta harus aktif melaporkannya

dan tidak tepat jika berdiam diri melihat pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak yang merugikan dirinya.

c) Penetapan Sementara

Inti utama dari lembaga penetapan sementara itu adalah dalam rangka mencegah berlari-larutnya penderitaan dan bertambah ruginya pencipta sebagai akibat dari tindak perbuatan pihak lain yang telah melanggar hak-hak pencipta (hak moral, hak ekonomi, hak terkait dan hak royalti). Di samping itu penetapan sementara juga dilatarbelakangi proses penyelesaian sengketa di pengadilan yang tidak dapat dilakukan dalam waktu yang cepat dan proses pengambilan putusan yang pendek. Juga, ada upaya hingga ke Mahkamah Agung, sementara pencipta telah jelas-jelas dirugikan. Oleh karena itu, harus ada tindakan yang dapat menghambat kerugian pencipta dengan memohon penetapan sementara ke Pengadilan Niaga dengan tujuan utama mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait ke jalur perdagangan, menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut dan juga mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar dan/atau menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar (Pasal 106 UUHC No. 28 Tahun 2014). Melalui penetapan sementara pencipta setidaknya dapat merasakan keadilan, meski tahap sementara, sementara kasus yang dihadapi dan ditangani Pengadilan Niaga tetap berjalan dan menunggu hingga selesainya kasus pelanggaran tersebut selesai.

d) Arbitrase

Mekanisme terakhir pencipta adalah dengan melibatkan ‘peradilan swasta’ yang dikenal dengan nama arbitrase (Pasal 95 UUHC No. 28 Tahun 2014). Arbitrase adalah forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Artinya, pencipta dapat juga menggunakan jalur ini sebagai alternatif memperjuangkan hak-haknya. Penggunaan Undang-Undang arbitrase telah diatur lebih khusus oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa. Dipilihnya mekanisme melalui jalur arbitrase adalah karena keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh melalui jalur ini di antaranya adalah kasusnya ditangani oleh para ahli yang ahli dalam bidangnya yang terdiri tiga hakim sebagai pemutus sengketa, penanganan perkaranya bersifat rahasia atau tidak dapat diketahui publik sehingga penyelesaiannya menjadi hanyalah diketahui para pihak yang berpekara, putusan peradilan relatif lebih cepat dibandingkan dengan peradilan umum dan terakhir putusannya adalah final dan mengikat (*final and binding*). Artinya, putusan arbitrase adalah yang pertama dan sekaligus terakhir, sehingga tidak ada lagi upaya lainnya. Dengan menggunakan arbitrase ini dimungkinkan pencipta memperoleh keadilan yang tidak terlalu lama dibandingkan dengan mekanisme yang tersedia dalam memperjuangkan hak-haknya.⁶³

Dengan pemaparan di atas dalam tataran UUHC telah terdapat jalur-jalur di dalam memperjuangkan hak-hak pencipta. Jadi, tidak ada alasan dan hambatan

⁶³ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm 66.

bagi pencipta untuk tidak menggunakannya. Yang haruslah dipersiapkan secara matang dan hati-hati oleh pencipta adalah bukti-bukti yuridis yang dapat mendukung dasar langkah-langkah tersebut. Sikap yang demikian menjadi kunci utama memperjuangkan hak-haknya dalam pengertian hak-hak pencipta menjadi lebih terlindungi secara maksimal melalui putusan pengadilan yang berpihak kepada pencipta. Hal ini karena pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi dan melalui ciptaannya akan dihasilkan setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Oleh karena itu adalah tepat UUHC telah memberikan proteksi maksimal kepada pencipta dengan mekanisme tersebut. Kendati demikian, semua pada akhirnya berpulang kepada pencipta apakah ia berkehendak untuk menegakkan hak-haknya atau tidak.⁶⁴

B. Implikasi Yuridis Perubahan Jenis Delik pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang selanjutnya disebut UUHC 2014 memberikan pengertian yang berbeda tentang pencipta dan pemegang hak cipta. Menurut Pasal 1 ayat (2) UUHC No. 28 Tahun 2014, Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri

⁶⁴ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, I, **Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 46.

atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pengertian pemegang hak cipta menurut Pasal 1 ayat (4) UUHC No. 28 Tahun 2014 adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, pencipta dapat sekaligus sebagai pemegang hak cipta, dalam hal tidak ada pengalihan hak cipta kepada pihak lain.⁶⁵ Pemegang hak cipta tidak selalu sebagai pencipta, hal ini dimungkinkan karena bisa saja pemegang hak cipta hanya menerima pengalihan hak dari pencipta.⁶⁶ Peralihan hak cipta yang diatur dalam Pasal 16 ayat (2) UUHC No. 28 Tahun 2014 dapat dilakukan dengan jalan pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beralihnya suatu hak cipta dari pencipta kepada orang yang menerima hak tersebut dilakukan dengan penyerahan (*assignment*) kepada orang yang menerima hak tersebut.⁶⁷

2. Perlindungan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak kekayaan yang bersifat immateril dan merupakan hak kebendaan.⁶⁸ Hak kekayaan immateril adalah suatu hak kekayaan yang objek haknya adalah benda tidak berwujud (benda tidak

⁶⁵ Sayud Margono, **Hukum & Perlindungan Hak Cipta**, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003, hlm. 38.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo Utomo, *Op.Cit*, hlm. 110

⁶⁸ H.OK.Saidin, *Op.Cit.* hlm. 111.

bertubuh).⁶⁹ Pengertian hak kebendaan sendiri menurut Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan adalah hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberi kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.⁷⁰ Hak cipta sebagai hak kebendaan memberikan dasar teoritis bahwa hak cipta dapat dipertahankan dari siapapun. Hal ini dibuktikan dalam UUHC 2014, yang memberikan jalan, baik sanksi pidana maupun gugatan perdata guna mempertahankan haknya tersebut. Salah satu asas yang melekat pada hak kebendaan adalah *droit de suite*, asas hakmengikuti bendanya.⁷¹ Hak cipta dilindungi sebagai hak milik, karena hak cipta merupakan hak kebendaan yang immateril. Hak milik ini menjamim pemilik untuk menikmati secara bebas dan melakukan tindakan hukum dengan bebas terhadap miliknya.⁷²

Alasan yang mendasari adanya perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta adalah seseorang telah mencurahkan usahanya untuk menciptakan atau menemukan sesuatu. Sudah seharusnya mereka mempunyai hak alamiah atau dasar untuk mengontrol atas apa yang telah diciptakannya. Pemahaman ini menyiratkan kewajaran dan keadilan.⁷³ Akan tampak tidak adil, bila seseorang mencuri usaha pencipta, dengan menggunakan karya mereka gunakepentingan komersiil tanpa meminta ijin terlebih dahulu. Berdasarkan uraian diatas, tujuan dari perlindungan hak cipta tersebut, untuk melindungi hak-hak yang seharusnya diterima pencipta

⁶⁹ *Ibid.* hlm. 52.

⁷⁰ *Ibid.* hlm. 48-49.

⁷¹ *Ibid.* hlm 111.

⁷² *Ibid.*

⁷³ Sayud Margono, *Op.Cit.*, hlm. 4.

atau pemegang hak cipta dari tindakan orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Hak cipta, seperti hak-hak lainnya yang dikenal dalam KI digolongkan sebagai hak milik pribadi yang tidak berwujud.⁷⁴ Konsep yang mendasari dalam perlindungan hak cipta adalah hak cipta tidak melindungi ide-ide, gagasan-gagasan, informasi, dan/atau fakta-fakta. Hak cipta melindungi perwujudan dari ide, gagasan, informasi, dan/atau fakta tersebut. Sejalan dengan konsep tersebut L. J. Taylor juga mengungkapkan bahwa yang dilindungi hak cipta adalah ekspresi dari sebuah ide, jadi bukan melindungi ide itu sendiri.⁷⁵ Pasal 2 persetujuan TRIPs juga menegaskan bahwa perlindungan hak cipta diberikan untuk pengungkapan ide-ide, tata cara, metode dari pengoperasian konsep matematika.⁷⁶

Perlindungan hak cipta erat hubungannya dengan pelanggaran hak cipta. Mengingat tujuan dari perlindungan hak cipta sendiri, untuk melindungi hak-hak pencipta dari tindakan pelanggaran yang dapat merugikan pencipta atau pemegang hak cipta. Ditetapkannya delik biasa dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, yang selanjutnya disebut UUHC 2002, dimaksudkan untuk menjamin perlindungan yang lebih baik dari sebelumnya. Delik biasa pada waktu UUHC 2002 berlaku, dianggap lebih baik memberikan perlindungan. Alasan delik biasa dianggap lebih baik memberikan perlindungan karena pelanggaran hak cipta dapat di

⁷⁴ *Ibid.* hlm. 25.

⁷⁵ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, I, **Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 46.

⁷⁶ Sayud Margono, *Op.Cit.*, hlm.8.

perkarakan di Pengadilan secara cepat dan tidak perlu menunggu pengaduan terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta. Delik biasa memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum, untuk secara langsung menindak pelanggaran hak cipta, tanpa menunggu aduan dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pencipta atau pemegang hak cipta merasa lebih terbantu dengan adanya sikap aktif aparat penegak hukum. Sikap aktif aparat penegak hukum tersebut juga diharapkan dapat mengurangi tindakan pelanggaran hak cipta, sehingga pencipta atau pemegang hak cipta semakin terlindungi.

UUHC 2014 tidak lagi mempertahankan delik biasa pada UUHC No.19 Tahun 2002 pasal 19 terkait pelanggaran hak cipta. Delik aduan yang digunakan dalam UUHC 2014 pasal 120 UUHC No. 28 Tahun 2014, membatasi ruang gerak aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti pelanggaran hak cipta. Hal ini disebabkan karena delik aduan tidak memberikan kewenangan bagi aparat penegak hukum untuk langsung melakukan tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hak cipta. Delik aduan sangat mungkin meningkatkan pelanggaran terhadap hak cipta, karena pelanggaran hak cipta hanya dapat ditindaklanjuti setelah adanya aduan dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hanya menunggu pengaduan dari pencipta atau pemegang hak cipta, tentunya akan memberikan kesempatan bagi pelanggaran hak cipta yang tidak diadukan terus berjalan.

C. Tujuan Pengaturan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

a) Tujuan Perubahan Delik

Setiap perubahan dapat dipastikan bertujuan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik lagi dari pencapaian sebelumnya. Begitu juga halnya dengan perubahan sifat delik UUHC yang dilakukan oleh pembuat undang-undang. Perubahan delik yang terjadi pada UUHC No. 28 Tahun 2014, yaitu dari delik biasa kembali lagi pada delik aduan hal tersebut diatur dalam pasal 120 UUHC No. 28 Tahun 2014. Diubahnya sifat delik ini bertujuan untuk semakin menegaskan bahwa hak cipta adalah hak yang bersifat personal, yaitu hak pribadi. Sudah selayaknya hak yang bersifat pribadi tersebut, apabila terjadi pelanggaran harus ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Perubahan delik biasa menjadi delik aduan tersebut bertujuan untuk memperjelas subyek yang dirugikan atas terjadinya pelanggaran hak cipta. Bila menggunakan delik biasa aparat penegak hukum sulit untuk mengetahui siapa pencipta atau pemegang hak cipta dari suatu karya yang disalahgunakan tersebut. Oleh karena itu menurut peneliti tujuan diubahnya delik pada UUHC tahun 2014 telah sesuai dengan tujuan diubahnya UUHC tahun 2002 ke UUHC tahun 2014 karena dalam hal ini aparat penegak hukum mudah untuk mengetahui siapa pencipta dari suatu karya yang ada. Hal yang serupa tidak akan terjadi bila digunakan delik aduan, dengan delik aduan akan jelas siapa

pencipta atau pemegang hak dari suatu karya yang disalahgunakan, apalagi jika menggunakan delik aduan, pencipta atau pemegang hak cipta sendiri yang akan melapor kepada aparat penegak hukum, hal tersebut tentu akan mempermudah pencipta untuk langsung melaporkan adanya penjiplakan atau pengcopyan Hak Cipta mereka. Apalagi di Era sekarang dengan adanya kemajuan teknologi akan mempermudah pencipta mengawasi hasil Ciptaan mereka.

b) Faktor yang Mendorong Perubahan

Perubahan tidak akan terjadi begitu saja tanpa adanya penyebab yang dapat mendorong timbulnya perubahan tersebut. Begitu pula yang terjadi dalam perubahan delik hak cipta. Alasan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang diungkapkan pada saat seminar RUU Hak Cipta di Universitas Trisakti, perubahan delik tersebut berkaitan dengan sifat kepemilikan itu sendiri. Kepemilikan hak cipta itu sifatnya pribadi, sehingga sudah hal yang wajar bila pribadi yang dirugikan itu sendiri yang mengadu pada aparat penegak hukum agar kasusnya ditindaklanjuti.

Penggunaan delik biasa dirasa kurang efektif karena aparat penegak hukum dalam menentukan apakah suatu karya itu asli atau hasil pelanggaran hak cipta itu tidak mudah. Selain itu, pada saat delik biasa digunakan dalam UUHC, aparat penegak hukum kesulitan dalam mencari alat bukti. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, delik biasa dirasa kurang efektif karena bila suatu

pelanggaran hak cipta secara otomatis diproses, maka aparat penegak hukum sulit untuk mengetahui pihak yang memiliki karya tersebut. Setelah pelanggaran hak cipta sampai di pengadilan, dalam banyak kasus pencipta atau pemegang hak cipta tidak mau hadir dalam persidangan. Menurut narasumber, hal tersebut akan menjadi percuma, karena tidak jelas untuk siapa aparat penegak hukum melakukan tindakan tersebut. Disisi lain, delik biasa lebih fleksibel bila dibandingkan dengan delik aduan. Fleksibel disini maksudnya, penyidik dapat lebih mudah dan cepat untuk memberantas pelanggaran hak cipta.

Salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan sifat delik biasa menjadi delik aduan tersebut adalah era MEA. Negara-negara yang menjadi anggota ASEAN menerapkan delik aduan dalam hal pelanggaran terhadap hak cipta. Misalnya Malaysia dalam *COPYRIGHT ACT 1987 Incorporating all amendments up to 1 January 2006*, menjelaskan bahwa malaysia menerapkan delik aduan terhadap pelanggaran hak cipta. Penggunaan delik negara-negara ASEAN dikatakan berpengaruh karena, dalam era MEA dengan mudah karya-karya dapat masuk ke negara-negara anggota MEA. Apabila Indonesia tetap mempertahankan menggunakan delik biasa, maka kepentingan orang asing di Indonesia sangat terlindungi. Hal ini disebabkan karena apabila karya warga negara asing disalahgunakan di Indonesia, warga negara asing tidak perlu datang ke Indonesia

untuk melapor. Aparat penegak hukum mempunyai kewenangan untuk menindak setiap ada pelanggaran hak cipta, tanpa adanya laporan dari pihak yang dirugikan. Kepentingan warga negara Indonesia sendiri di negara lain tidak dapat terlindungi secara maksimal, hal ini disebabkan karena negara-negara tersebut menggunakan delik aduan. Untuk itu, apabila karya warga negara Indonesia disalahgunakan di negara lain, warga negara Indonesia harus datang ke negara tersebut untuk melaporkan pelanggaran tersebut. Apabila warga Indonesia yang dirugikan akibat adanya pelanggaran hak cipta tidak melapor, maka pelanggaran tersebut tidak dapat ditindaklanjuti.

c) Konsekuensi Perubahan Delik

Perubahan delik biasa menjadi delik aduan dalam UUHC No. 28 tahun 2014, memang mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Menurut peneliti dampak positif delik aduan adalah akan terdapat kejelasan tentang siapa penciptanya, siapa yang dirugikan atas pelanggaran tersebut, dan apabila kasus tersebut sampai ke pengadilan maka tidak akan sulit untuk menghadirkan pihak-pihak yang dirugikan tersebut.

Menurut Gunawan seorang Praktisi Hak Kekayaan intelektual:

Penggunaan Delik Aduan dapat mencegah adanya oknum Polisi yang memanfaatkan delik ini untuk menambah pundi-pundi.⁷⁷

⁷⁷ Lilik Mulyadi, 2014, **Hindari Polisi Nakal, RUU Hak Cipta Gunakan Delik Aduan** (online), <http://m.hukumonline.com>, "Hindari Polisi Nakal, RUU Hak Cipta Gunakan Delik Aduan", (12 November 2017).

Sebagai contoh razia program komputer bajakan, saat razia yang dilakukan oleh oknum polisi adalah memeras perusahaan yang tertangkap. Dalam hal ini Gunawan mengatakan bahwa, perusahaan yang tertangkap akan menjadi pemasukan bagi oknum-oknum tersebut. Tidak hanya oknum polisi, oknum jaksa juga banyak mengambil kesempatan. Sudah menjadi hal biasa bila pelanggaran hak cipta yang sampai ke pengadilan, artinya antara oknum polisi dan oknum jaksa, dengan pelanggar tidak terjadi kesepakatan soal harga.

Dampak positif perubahan delik dalam UUHC bagi aparat penegak hukum ialah terpecahkannya kesulitan-kesulitan yang timbul pada saat penggunaan delik biasa. Kesulitan yang timbul pada saat digunakannya delik biasa antara lain terkait dengan proses penegakan hukum. Delik biasa yang digunakan dalam UUHC 2002, pada kenyataannya mempersulit aparat penegak hukum dalam mencari alat bukti guna proses penyidikan. Digunakannya delik aduan akan mempermudah dan mempercepat proses penegakan hukum. Dikatakan mempermudah dan mempercepat proses penegakan hukum karena aparat penegak hukum tidak akan kesulitan dalam mencari barang bukti dan untuk membandingkan antara barang yang asli dan barang hasil pelanggaran. Alat bukti yang diperlukan tersebut telah disiapkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta sebagai pihak yang mengaduakan adanya pelanggaran hak cipta pasal 67 UUHC No. 28

Tahun 2014. Selain dua hal diatas, delik aduan yang digunakan dalam UUHC 2014 juga memudahkan pencipta untuk mengajukan permohonan penetapan sementara sebagaimana tercantum dalam pasal 107 UUHC No. 28 Tahun 2014.

Terpecahkannya kesulitan-kesulitan yang timbul sebelum digunakan delik aduan diharapkan semakin memberikan perlindungan terhadap pencipta atau pemegang hak cipta. Perubahan delik selain memberikan dampak positif bagi aparat penegak hukum, juga memberikan dampak positif bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Delik aduan memberikan hak penuh kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mempertahankan haknya atau tidak, hal ini disebabkan karena sifat hak cipta sebagai hak yang bersifat pribadi. Sifat hak cipta sebagai hak pribadi menyebabkan pencipta atau pemegang hak cipta mempunyai pilihan akan menggunakan haknya atau tidak.

Pertimbangan-pertimbangan untuk melakukan penuntutan atau tidak sepenuhnya tergantung pada pencipta atau pemegang hak cipta. Secara konseptual, delik aduan lebih mengedepankan pola pikir bahwa, hak cipta merupakan hak perdata⁷⁸. Hak cipta yang meliputi hak ekonomi dan moral pasal 62 dan pasal 63 UUHC No. 28 Tahun 2014, maka bisa jadi bahwa pencipta atau pemegang hak cipta tidak mengadakan pelanggaran hak cipta melakukan upaya hukum

⁷⁸ Henry Sulistio Budi, Law Rivew Volume X No. 3, **Delik Biasa VS Delik Aduan Dalam Undang-Undang Hak Cipta Kajian Yuridis dan Pragmatis**, 2011, hlm. 387.

sebagaimana diatur dalam UUHC No. 28 Tahun 2014, apabila pelanggaran tersebut mengganggu pencipta atau pemegang hak cipta lebih cenderung melakukan gugatan perdata. Penggunaan delik aduan, berdasarkan penjelasan diatas tidak memberikan dampak negatif bagi aparat penegak hukum. Delik aduan malah semakin mempermudah aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum. Disisi lain penggunaan delik aduan dalam UUHC 2014, membawa dampak yang kurang bagus bagi performa penegakan hukum. Delik aduan akan menyebabkan banyaknya pelanggaran hak cipta yang tidak diadukan. Keadaan ini disebabkan karena, proses penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta hanya dapat dilakukan setelah adanya pengaduan.

Untuk dapat meminimalisir pelanggaran hak cipta atau bahkan menghilangkan pelanggaran hak cipta, tidak cukup hanya berharap pada peran aparat penegak hukum. Sudah seharusnya Pencipta atau pemegang hak cipta tidak hanya berharap pada aparat penegak hukum. Peran aktif pencipta atau pemegang hak cipta untuk aktif melaporkan setiap pelanggaran hak cipta atas karya mereka. Pelanggaran hak cipta dapat di minimalisir dengan memulai dari pihak konsumen. Konsumen dalam membeli setiap karya, harusnya tidak hanya berpikir ekonomis, melainkan harus saling menghargai karya orang lain. Untuk menghentikan pelanggaran hak cipta, juga diperlukan kesadaran dari pihak pelanggar. Sudah seharusnya pihak pelanggar sadar bahwa

kegiatan yang dilakukannya merugikan orang lain dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan yang dibuat seharusnya dapat menumbuhkan kesadaran pada pihak pelanggar sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penggunaan delik tidak dapat menimbulkan kesadaran dari pihak pelanggar. Pihak pelanggar bukannya tidak tahu bahwa kegiatan tersebut dilarang oleh hukum, namun mereka sudah terbiasa melakukan kegiatan tersebut. Kebiasaan melanggar hukum menyebabkan mereka sudah tidak peduli terhadap aturan hukum. Delik aduan cenderung melindungi pihak pelanggar yang tidak dilaporkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Pelanggar hak cipta yang tidak dilaporkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta, akan terus melakukan kegiatannya. Hal ini disebabkan karena mereka tidak mendapatkan sanksi apapun dari hukum. Tidak adanya sanksi bagi pelanggar hak cipta yang tidak dilaporkan, menyebabkan pelanggar tetap melanjutkan kegiatan dan tidak dapat membangun kesadaran pihak pelanggar sendiri. Pelanggar hak cipta sendiri, berpendapat bahwa tindakan mereka tidak merugikan pihak pencipta, terbukti dengan tidak adanya laporan. Oleh sebab itu pihak pelanggar tetap menjalankan kegiatannya, padahal kegiatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari dua (2) pokok permasalahan diatas yang telah dikemukakan, dapat diambil kesimpulan dari penelitian penulis atau hasil dan pembahasan diatas, diuraikan sebagai berikut :

1. Implikasi Yuridis Perubahan Jenis Delik pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah kehendak negara untuk melindungi pencipta atau pemegang hak cipta, serta kehendak negara untuk terlibat dalam pergaulan internasional dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual. Adanya kehendak untuk memudahkan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum, juga menjadi salah satu faktor pendorong perubahan delik. Perubahan delik biasa menjadi delik aduan tidak memperlemah perlindungan terhadap pencipta atau pemegang hak cipta. Perubahan tersebut justru memberikan kepastian kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas tuntasnya penyelesaian pelanggaran hak cipta yang diadukan. Delik aduan menyebabkan Pencipta atau pemegang hak cipta semakin diakui sebagai yang berhak atau dengan kata lain pencipta atau pemegang hak cipta tidak hanya dianggap sebagai pelengkap. Oleh karena itu UUHC 2014 tidak lagi mempertahankan delik biasa pada UUHC No.19 Tahun 2002 pasal 19 terkait pelanggaran hak cipta. Delik aduan yang digunakan dalam UUHC 2014 pasal 120 UUHC No. 28 Tahun 2014, membatasi ruang

gerak aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti pelanggaran hak cipta. Hal ini disebabkan karena delik aduan tidak memberikan kewenangan bagi aparat penegak hukum untuk langsung melakukan tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hak cipta. Delik aduan sangat mungkin meningkatkan pelanggaran terhadap hak cipta, karena pelanggaran hak cipta hanya dapat ditindaklanjuti setelah adanya aduan dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hanya menunggu pengaduan dari pencipta atau pemegang hak cipta, tentunya akan memberikan kesempatan bagi pelanggaran hak cipta yang tidak diadukan terus berjalan.

2. Setiap perubahan dapat dipastikan bertujuan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik lagi dari pencapaian sebelumnya. Begitu juga halnya dengan perubahan sifat delik UUHC yang dilakukan oleh pembuat undang-undang. Perubahan sifat delik UUHC pertama kali terjadi pada UUHC 1987, yaitu dari delik aduan menjadi delik biasa. Tujuan perubahan delik untuk pertama kalinya ini, bila dilihat dari faktor yang mendorong perubahan, maka bertujuan untuk mengurangi pelanggaran hak cipta. Delik aduan yang digunakan oleh UUHC 1982, menyebabkan pelanggaran hak cipta mencapai pada tingkat yang membahayakan. Keadaan tersebut, menyebabkan pembuat undang-undang mengubah sifat delik aduan menjadi delik biasa. Perubahan delik yang kedua terjadi pada UUHC 2014, yaitu dari delik biasa kembali lagi pada delik aduan. Diubahnya sifat delik ini bertujuan

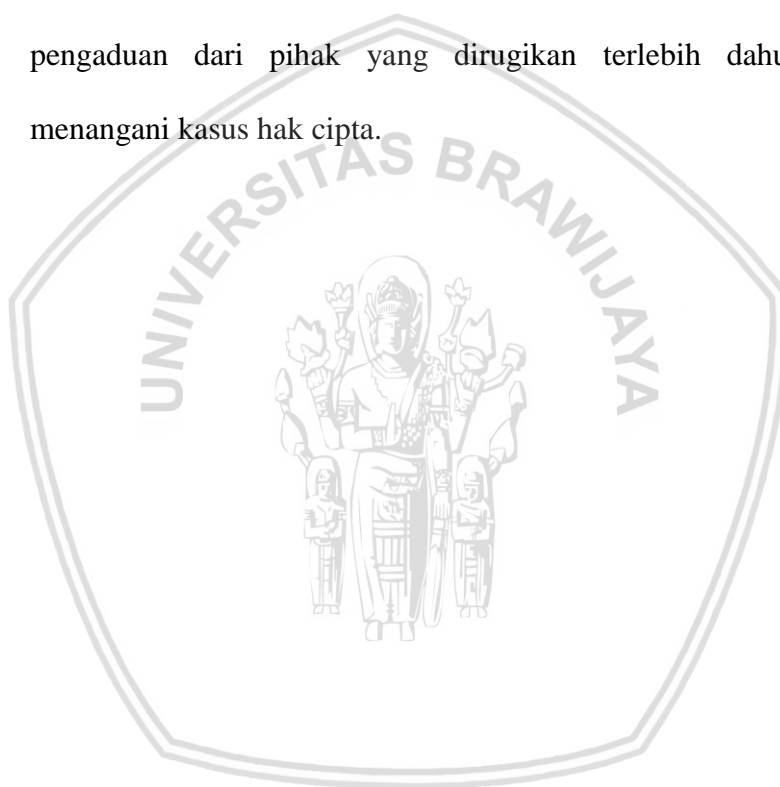
untuk semakin menegaskan bahwa hak cipta adalah hak yang bersifat personal, yaitu hak pribadi. Sudah selayaknya hak yang bersifat pribadi tersebut, apabila terjadi pelanggaran harus ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Perubahan delik biasa menjadi delik aduan tersebut bertujuan untuk memperjelas subyek yang dirugikan atas terjadinya pelanggaran hak cipta. Bila menggunakan delik biasa aparat penegak hukum sulit untuk mengetahui siapa pencipta atau pemegang hak cipta dari suatu karya yang disalahgunakan tersebut. Oleh karena itu menurut peneliti tujuan diubah nya delik pada UUHC tahun 2014 telah sesuai dengan tujuan diubahnya UUHC tahun 2002 ke UUHC tahun 2014 karena dalam hal ini aparat penegak hukum mudah untuk mengetahui siapa pencipta dari suatu karya yang ada. Hal yang serupa tidak akan terjadi bila digunakan delik aduan, dengan delik aduan akan jelas siapa pencipta atau pemegang hak dari suatu karya yang disalahgunakan. Hal tersebut disebabkan karena bila menggunakan delik aduan, pencipta atau pemegang hak cipta sendiri yang akan melapor kepada aparat penegak hukum.

B. SARAN

1. Perubahan delik memberikan kepastian hukum kepada pencipta atau pemegang hak cipta, karena dengan digantinya delik biasa menjadi delik aduan menjadikan pencipta atau pemegang semakin diakui sebagai yang berhak atau dengan kata lain pencipta atau pemegang hak cipta tidak hanya dianggap sebagai pelengkap, namun sebaiknya sanksi

yang diberikan bagi pelanggar hak cipta itu sendiri semakin dipertegas, dan atau semakin berat.

2. Diubahnya sifat delik biasa menjadi delik aduan semoga akan terus sesuai dengan tujuan awal diubahnya UUHC 2002 menjadi UUHC 2014, apalagi dalam UUHC 2014 lebih menegaskan bahwa hak cipta sepenuhnya merupakan hak pribadi oleh karena itu harus ada pengaduan dari pihak yang dirugikan terlebih dahulu sebelum menangani kasus hak cipta.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ashofa, B. **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
- Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, **Pokok-pokok Hukum Pidana**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Djumhana dan Djubaedillah, **Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Djumhana, M. & Djubaedillah, R. **Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia)**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Hamidi, **Metode Penelitian dan Teori Komunikasi**, UMM Press, Malang, 2010.
- Hasbir Paserangi & Ibrahim Ahmad, **Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Komputer Dalam Hukungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs di Indonesia**, Rabbani Press, Jakarta, 2011.
- Henry Sulistio Budi, Law Rivew Volume X No. 3, **Delik Biasa VS Delik Aduan Dalam Undang-Undang Hak Cipta Kajian Yuridis dan Pragmatis**, 2011.
- Imam Sjahputra, **Hak Atas Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)**, Harvarindo, Jakarta, 2007.
- Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang 2012.
- Laden Marpaung, **Asas Teori Praktik Hukum Pidana**, VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Leden Marpaung, **Tindak Pidana Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual** Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Lindsey, T. Dkk, **Hak Kekayaan Intelektual**, PT. ALUMNI, Bandung, 2002.
- Lutviansori Arif, **Hak Cipta Dan Perlindungan Folklor Di Indonesia**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Margono, S. & Angkasa, A, **Komersiliasi Aset intelektual aspek hukum bisnis**, Grasindo, Jakarta, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir, **Kajian Hukum Ekonomi, Hak Kekayaan Intelektual**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, I, **Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1993.
- Nurachmad, **Segala tentang HAKI Indonesia Buku Pintar Memahami Aturan HAKI Kita**, Buku Biru, Yogyakarta, 2012.
- OK, Saidin, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- O.C.Kaligis, **Teori-Praktik Merek dan Hak Cipta**, Penerbit P.T Alumni, Bandung, 2012.

- P.A.F Lamintang, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Cet 2, Sinar Baru, Bandung, 1990.
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum (Edisi Revisi)**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Purba, A, **Pemberdayaan Perlindungan hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia**, PT. Alumni, Bandung, 2012.
- Rachmad Baro, **Penelitian Hukum Non-Doktrinal : Penggunaan Metode & Teknik Penelitian Sosial di Bidang Hukum**, Deepublish|Publisher, Yogyakarta, 2016.
- Rachmadi Usman, I, **Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia**, PT. ALUMNI, Bandung, 2003.
- Rahmi Jened, **Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Sardjono, A, **Hak kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional..** PT. Alumni, Bandung, 2010.
- Sayud Margono, **Hukum & Perlindungan Hak Cipta**, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003.
- Sedarmayanti, & Hidayat, S, **Metodologi Peneltian**, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Sedyawati, Edi, **Budaya Indonesia : Kajian Arkeologi, Seni dan Sejarah**, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Setyawati, Edi, **Warisan Tradisi, Penciptaan dan Perlindungan**, Wedatama Widya Sastra, Jakarta, 2013.
- Sims. M.C. & Stephens M, *Living Folklore: An Introduction to The Study of People and Their Tradisions*, Utah State University Press, Logan, Utah, 2005.
- Soekanto, S. **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)**, C.V. Rajawali, Jakarta, 1990.
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)**, RajawaliPers, Jakarta, 2001.
- Sudarto, **Hukum Pidana I A dan I B**, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1975.
- Sudarto, **Hukum Pidana I A dan I B**, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990.
- Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Sumandar, Haris. , & Sitanggang, Sally, **Mengenal Hak Kekayaan Intelektual**, Esensi, Jakarta, 2008.
- Supramono, G., **Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukum**, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Supratman, **Metode Penelitian Hukum**, Alvabeta, Malang, 2012.

- Sunggono, B., **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Tamotsu Hozumi, **Asian Copyrights Handbook Indonesian Version Buku Panduan Hak Cipta Asia**, Jakarta: Asia/pacific Cultural Centre for UNESCO, Ikatan Penerbit Indonesia, 2004.
- Teguh Prasetyo, **Hukum Pidana**, I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Tomi Suryo Utomo, **Hak Kekayaan Intelektual (HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL) di Era Global**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Wiryo Prodjodikoro, **Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Yustisia, Tim Visi. **Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, Hingga Menyelesaikan Sengketa**, Visimedia, Jakarta, 2015.

Peraturan Perundang-Undang:

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266).

Skripsi

- Mega Silviana Kurniawati.M, **Konsekuensi Perubahan Sifat Delik Pelanggaran Hak Cipta terhadap Perlindungan Pencipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**, Yogyakarta, 2015.
- Mirwansyah, **Analisa Hukum Terhadap Tindak Pidana Hak Cipta (Ditinjau dari Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**, Jakarta, 2017.
- Aan Priyatna, **Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta dalam Pembuatan E-Book**, Semarang, 2016.
- Zainul Amin, **Penegakan Hukum terhadap Hak Cipta dalam Bidang Industri Kreatif di Negara Kesatuan Republik Indonesia**, Surabaya, 2018.

Media Online:

- Lilik Mulyadi, 2014, **Hindari Polisi Nakal, RUU Hak Cipta Gunakan Delik Aduan** (online), <http://m.hukumonline.com>, “**Hindari Polisi Nakal, RUU Hak Cipta Gunakan Delik Aduan**”, diakses pada tanggal 12 November 2017.

Utsman Ali, 2015, **Pengertian Haki Hak Atas Kekayaan Intelektual** (*online*), <http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-haki-hak-atas-kekayaan.html#> diakses pada tanggal 23 Februari 2018.

Kompas, 2012, **Bantengan Seni Tari Tradisional dari Malang** (*online*), <http://sosbud.kompasiana.com/2012/08/25/bantengan-seni-tari-tradisional-dari-malang-488664.html>, diakses pada tanggal 26 Februari 2018.





KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 830. Tahun 2017

TENTANG

PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- g : a. bahwa penulisan skripsi merupakan syarat yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;
- b. bahwa demi kelancaran penulisan skripsi diperlukan dosen pembimbing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penugasan Dosen sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
- t : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
4. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 57 Tahun 2015 Tanggal 2 Pebruari 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 992/SK.FH/2016 tentang Pedoman Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017.

MEMUTUSKAN:

- an : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
- : **Dr. Bambang Sugiri, SH.M.Hum.;** **Dr. Yuliati, SH.LLM.,** masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Penulisan Skripsi mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum atas nama **Kartiko Yudi Prakosa NIM 125010107111183**
- : Keputusan Dekan ini berlaku 6 bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 16 Agustus 2017



Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Nama Dosen Pembimbing Utama :
Nama Dosen Pendamping :
SK. Dekan :

Dr. Bambang Gogri, SH., MS.
Dr. Yulianti, SH., LL.M.
No. 830
Tgl. 16 Agustus 2017

Bimbingan mulai :

16 Agustus 2017

Bimbingan selesai :

23 Mei 2018

Tanggal	Bimbingan yang diberikan oleh Dosen		KETERANGAN / CATATAN
	Pembimbing I	Pembimbing II	
27 Februari 2018	Perubahan judul dan rumusan masalah.	Perbaikan rumusan masalah	
27 Februari 2018			
28 Februari 2018	Perubahan judul dan revisi Bab I dan Bab II	Perbaikan Bab I dan Bab II	
12 Maret 2018		Perbaikan metapen	
19 Maret 2018			
9 Maret 2018	ACC Bab I, II	Perbaikan Bab III dan IV	
14 April 2018		Perbaikan Koreksi Bab I - Bab IV	
24 April 2018		Perbaikan kesimpulan, saran, dan dapus.	
4 Mei 2018			
04 April 2018	Penambahan judul, ACC Bab IV-V		

Mengetahui
Ketua Bagian Pidana.....

Dr. Yulianti, SH., LL.M.

Dosen Pembimbing Pendamping

Dr. Yulianti, SH., LL.M.

Mei 2018
Malang,
Dosen Pembimbing Utama

Dr. Bambang Gogri, SH., MS.

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia

Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505

E-mail : hukum@ub.ac.id

http://hukum.ub.ac.id

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 490/Plagiasi/FH/2018

Surat keterangan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : KARTIKO YUDI PRAKOSA

NIM : 125010107111183

Judul : IMPLIKASI YURIDIS PERUBAHAN JENIS DELIK PADA
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector, menunjukkan tingkat
kesamaan dibawah 5% dan memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 24 Mei 2018

Ketua Deteksi Plagiasi,



[Signature]
Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.
NIP. 196111161986011001

ISSUED
PLAGIASI FH UB



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No.169, Malang 65145 Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id <http://www.hukum.ub.ac.id>

SURAT KETERANGAN
Nomor : 2984/UN10.F01.01 /PP/2018

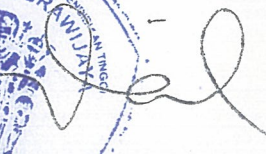
etua Laboratorium Bahasa Inggris Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, menerangkan bahwa :

ama : KARTIKO YUDI PAKOSO
IM : 125010107111183

elah mengurus terjemahan judul dan abstraksi skripsi dengan judul :
**JURIDICAL IMPLICATION OF AMENDMENT OF OFFENSE IN LAW NUMBER 28
OF 2014 ON COPYRIGHT**

emikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai syarat mendaftar wisuda dan
engurus Transkrip Nilai Asli.

Malang, 2 JULI 2018
Klinik Jurnal Pusat Data Akreditasi


Dian Pawestri, SH.,MH
NIK 2013048307232001

COPY

IMPLIKASI YURIDIS PERUBAHAN JENIS DELIK PADA
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

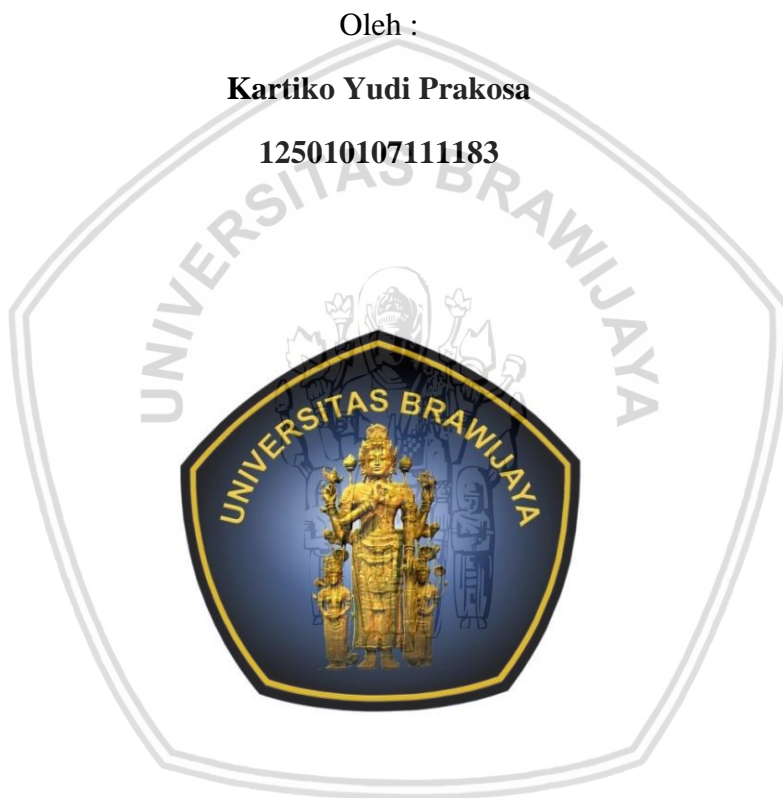
JURNAL ARTIKEL

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

Kartiko Yudi Prakosa

125010107111183



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2018

JURNAL ARTIKEL

IMPLIKASI YURIDIS PERUBAHAN JENIS DELIK PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Identitas Peneliti :

1. Nama : Kartiko Yudi Prakosa

2. NIM : 125010107111183

Konsentrasi : Hukum Pidana

angka Waktu Penelitian : Bulan

Ditetapkan pada tanggal :

Pembimbing Utama,


Dr. Bambang Sugiri, SH., MS.

NIP.19570717 198403 1 002

Pembimbing Pendamping,


Dr Yuliati, SH.,LL.M.

NIP.19660710 199203 2003

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Pidana,



Dr Yuliati, SH.,LL.M.

NIP: 19660710 199203 2003

IMPLIKASI YURIDIS PERUBAHAN JENIS DELIK PADA
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Kartiko Yudi Prakosa, Dr. Bambang Sugiri, SH., MS.

Dr Yuliati, SH.,LL.M.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: tiko.okit77@gmail.com

ABSTRAK

Perubahan Jenis Delik pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah kehendak negara untuk melindungi pencipta atau pemegang hak cipta, serta kehendak negara untuk terlibat dalam pergaulan internasional dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual. Adanya kehendak untuk memudahkan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum, juga menjadi salah satu faktor pendorong perubahan delik. Perubahan delik biasa menjadi delik aduan tidak memperlemah perlindungan terhadap pencipta atau pemegang hak cipta. Perubahan tersebut justru memberikan kepastian kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas tuntasnya penyelesaian pelanggaran hak cipta yang diadukan. Delik aduan menyebabkan Pencipta atau pemegang hak cipta semakin diakui sebagai yang berhak atau dengan kata lain pencipta atau pemegang hak cipta tidak hanya dianggap sebagai pelengkap. perubahan dapat dipastikan bertujuan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik lagi dari pencapaian sebelumnya. Begitu juga halnya dengan perubahan sifat delik UUHC yang dilakukan oleh pembuat undang-undang. Perubahan delik biasa menjadi delik aduan tersebut bertujuan untuk memperjelas subyek yang dirugikan atas terjadinya pelanggaran hak cipta. Bila menggunakan delik biasa aparat penegak hukum sulit untuk mengetahui siapa pencipta atau pemegang hak cipta dari suatu karya yang disalahgunakan tersebut. Oleh karena itu menurut peneliti tujuan diubah nya delik pada UUHC tahun 2014 telah sesuai dengan tujuan diubahnya UUHC tahun 2002 ke UUHC tahun 2014 karena dalam hal ini aparat penegak hukum mudah untuk mengetahui siapa pencipta dari suatu karya yang ada. Hal yang serupa tidak akan terjadi bila digunakan delik aduan, dengan delik aduan akan jelas siapa pencipta atau pemegang hak dari suatu karya yang disalahgunakan. Hal tersebut disebabkan karena bila menggunakan delik aduan, pencipta atau pemegang hak cipta sendiri yang akan melapor kepada aparat penegak hukum. Berdasarkan uraian tersebut maka seharusnya perubahan delik memberikan kepastian hukum kepada pencipta atau pemegang hak cipta, karena dengan digantinya delik biasa menjadi delik aduan menjadikan pencipta atau pemegang semakin diakui sebagai yang berhak atau dengan kata lain pencipta atau pemegang hak cipta tidak hanya dianggap sebagai pelengkap, namun sebaiknya sanksi yang diberikan bagi pelanggar hak cipta itu sendiri semakin dipertegas, dan atau semakin berat.

Kata Kunci: Perubahan Jenis Delik, Hak Cipta.

JURIDICAL IMPLICATION OF AMENDMENT OF OFFENSE IN LAW NUMBER 28 OF 2014 ON COPYRIGHT

Kartiko Yudi Prakosa, Dr. Bambang Sugiri, SH., MS.

Dr. Yuliati, SH., LL.M.

Faculty of Law Universitas Brawijaya

Email:

ABSTRACT

The amendment of type of offense in Law Number 28 of 2014 on Copyright is encouraged by state aimed to protect a creator or someone who lawfully holds copyright and to be involved in international interaction of intellectual property. The encouragement from the state to open wider access for law enforcers to the process of law enforcement is a contributing factor to the amendment of offense. When the offense is amended to complaint offense, it does not give any consequence to the creator of a product or to anyone who lawfully holds the copyright. On the contrary, this amendment gives certainty to the creator or copyright holder regarding the completion of dispute settlement related to the case reported. Complaint offense gives more chance to the copyright holder to be more acknowledged as the party is lawfully entitled to the copyright. The amendment is aimed to lead to a better condition. Similarly, in terms of the change in the characteristic of offense of Law on Copyright (further stated as UUHC) by lawmakers, the amendment to complaint offense is aimed to highlight the injured party regarding the infringement of copyright. While in normal offense, it is hard to find out the creator of a product or the copyright holder. Therefore, the research result reveals that the amendment of offense in UUHC of 2014 is relevant to the objective of amendment of UUHC of 2002 to UUHC of 2014. This way, it is not hard for law enforcers to know the real creator of a product. It will not happen in complaint offense, as it is clear in terms of the creator or the copyright holder of a creation abused. It is because the creator or copyright holder could complain to the police when complaint offense is applied. Therefore, the amendment of Law Number 28 of 2014 on Copyright does not amend the existing offense contained in Law Number 19 of 2002 on Copyright, for the offense amendment could harm the creator of a product.

Keywords: amendment of type of offense, copyright

COPY



PENDAHULUAN

Hak cipta adalah hak yang lahir atas kreasi dari manusia, kreasi yang muncul dari olah hati dan olah pikir, atau dalam terminologi adalah hak yang lahir atas cipta, rasa dan karsa manusia. Dengan menggunakan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosioanal yang dimiliki oleh pencipta atau *Inventor* secara khusus yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ciptaan atau invensi. Ciptaan atau *invensi* adalah hak milik material (berwujud), diatas hak milik material tersebut melekat hak milik immaterial (tak berwujud) yang berasal dari akal pemiliknya sehingga disebut dengan hak kekayaan intelektual (selanjutnya disebut sebagai HKI).

Seiring dengan banyaknya masalah mengenai pembajakan di Indonesia. Pemerintah melakukan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yaitu tentang Hak Cipta, yang selanjutnya digantikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹ Perubahan ini terdapat pada Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pembaruan peraturan tentang hak cipta tersebut terjadi karena perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga peraturan yang lama sudah tidak sesuai lagi. Terdapat beberapa perubahan yang dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC). Salah satunya tentang klasifikasi delik yang ada dalam UUHC. Disatu sisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 menggunakan delik biasa dalam menindak pelanggaran hak cipta. Disisi lain delik biasa yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tidak dipertahankan lagi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 melainkan menggunakan delik aduan.²

Perubahan sifat delik UUHC pertama kali terjadi pada UUHC 1987, yaitu dari delik aduan menjadi delik biasa. Tujuan perubahan delik untuk pertama kalinya ini, bila dilihat

¹ Lembaran Negara Nomor 266 Tahun 2014.

² Tomi Suryo Utomo, **Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 2.

dari faktor yang mendorong perubahan, maka bertujuan untuk mengurangi pelanggaran hak cipta. Delik aduan yang digunakan oleh UUHC 1982, menyebabkan pelanggaran hak cipta mencapai pada tingkat yang membahayakan. Keadaan tersebut, menyebabkan pembuat undang-undang mengubah sifat delik aduan menjadi delik biasa. Perubahan delik yang kedua terjadi pada UUHC 2014, yaitu dari delik biasa kembali lagi pada delik aduan. Diubahnya sifat delik ini bertujuan untuk semakin menegaskan bahwa hak cipta adalah hak yang bersifat personal, yaitu hak pribadi. Sudah selayaknya hak yang bersifat pribadi tersebut, apabila terjadi pelanggaran harus ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Persoalan yang muncul dengan diubahnya delik adalah apa dengan diubahnya delik biasa menjadi delik aduan dapat memperlemah perlindungan hukum terhadap pencipta atau pemegang hak. Pertanyaan tersebut muncul karena, pada saat Indonesia masih menggunakan delik biasa, dimana aparat penegak hukum dapat aktif menindak, pelanggaran terhadap hak cipta banyak terjadi. Bagaimana dengan saat ini, dimana aparat penegak hukum tidak dapat aktif menindak pelanggaran terhadap hak cipta.

Perubahan UUHC yang dilakukan pemerintah semata-mata dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penindakan. Dikarenakan Delik biasa dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan. Padahal pelanggaran hukum seperti itu seharusnya memang diperlakukan sebagai Tindak Pidana biasa. Dengan kata lain, penindakannya tidak semata-mata didasarkan pada adanya pengaduan.³ Delik biasa adalah penindakan dapat segera dilakukan tanpa menunggu adanya pengaduan, sedangkan Delik aduan diharuskan pihak yang dirugikan mengadukan kepada kepolisian baru dapat diproses.

Selain dimaksudkan untuk melakukan tindakan preventif rusaknya tatanan pasar, penerapan delik biasa sekaligus untuk menjadi pendorong sikap dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kepatuhan dan ketaatan pada hukum. Hak cipta

³ Penjelasan Angka 17, UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (*art and literary*) yang didalamnya mencakup pula program komputer.

Perlindungan hak cipta erat hubungannya dengan pelanggaran hak cipta. Mengingat tujuan dari perlindungan hak cipta sendiri, untuk melindungi hak-hak pencipta dari tindakan pelanggaran yang dapat merugikan pencipta atau pemegang hak cipta. Ditetapkannya delik biasa dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta 2002, dimaksudkan untuk menjamin perlindungan yang lebih baik dari sebelumnya. Undang-Undang Hak Cipta alasan delik biasa dianggap lebih baik memberikan perlindungan karena pelanggaran hak cipta dapat di perkarakan di Pengadilan secara cepat dan tidak perlu menunggu pengaduan terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta. Delik biasa memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum, untuk secara langsung menindak pelanggaran hak cipta, tanpa menunggu aduan dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pencipta atau pemegang hak cipta merasa lebih terbantu dengan adanya sikap aktif aparat penegak hukum. Sikap aktif aparat penegak hukum tersebut juga diharapkan dapat mengurangi tindakan pelanggaran hak cipta, sehingga pencipta atau pemegang hak cipta semakin terlindungi.

MASALAH

1. Bagaimana implikasi yuridis perubahan jenis delik pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Apakah perubahan delik tersebut sesuai dengan tujuan pengaturan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta?

METODE

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu jenis penelitian yuridis normatif, adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum sosial.⁴

Pendekatan penelitian yuridis normatif, Metode pendekatan yuridis normatif ini dilakukan dengan upaya menelaah buku-buku, jurnal-jurnal, makalah yang berkaitan dengan objek yang diteliti.⁵ Oleh karena itulah, pendekatan yang digunakan oleh peneliti ialah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani,⁶ yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Implikasi Yuridis Perubahan Jenis Delik pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Jenis dan sumber bahan hukum menggunakan jenis bahan hukum primer dan sekunder, sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik penelusuran bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan bahan hukum dengan melakukan penelitian di perpustakaan terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, *literature*, dokumen, pendapat pakar, jurnal, serta artikel-artikel yang dapat memperjelas konsep-konsep hukum.

⁴Johnny Ibrahim, **Teoridan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2012, hlm. 57.

⁵Soerjono Soekanto, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)**, C.V. Rajawali, Jakarta, 1990, hlm.36

⁶Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum (EdisiRevisi)**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm.133.

PEMBAHASAN

A. Implikasi Yuridis Perubahan Jenis Delik pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang selanjutnya disebut UUHC 2014 memberikan pengertian yang berbeda tentang pencipta dan pemegang hak cipta. Menurut Pasal 1 ayat (2), Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pengertian pemegang hak cipta menurut Pasal 1 ayat (4) adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, pencipta dapat sekaligus sebagai pemegang hak cipta, dalam hal tidak ada pengalihan hak cipta kepada pihak lain.⁷ Pemegang hak cipta tidak selalu sebagai pencipta, hal ini dimungkinkan karena bisa saja pemegang hak cipta hanya menerima pengalihan hak dari pencipta.⁸ Peralihan hak cipta yang diatur dalam Pasal 16 ayat (2), dapat dilakukan dengan jalan pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beralihnya suatu hak cipta dari pencipta kepada orang yang menerima hak tersebut dilakukan dengan penyerahan (*assignment*) kepada orang yang menerima hak tersebut.⁹

2. Delik

Kata delik berasal dari Latin, yaitu *delictum*. Delik dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut

⁷ Sayud Margono, **Hukum & Perlindungan Hak Cipta**, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003, hlm. 38.

⁸ Ibid.

⁹ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo Utomo, *Op.Cit*, hlm. 110

delict.¹⁰ Menurut kamus Bahasa Indonesia yang selanjutnya disebut KBBI delik diartikan sebagai, perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.¹¹ Menurut Mr. Van Der Hoeven, pengertian delik yang terdapat dalam KBBI kurang tepat. Pendapat tersebut didasarkan pada alasan bahwa, yang dapat dihukum adalah manusianya bukan perbuatannya.¹² Pengertian delik menurut beberapa ahli, antara lain :

- 1) Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum baik yang dilakukan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.¹³
- 2) Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.¹⁴
- 3) Teguh Prasetyo, delik adalah perbuatan yang melanggar hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab dan pelakunya diancam pidana.¹⁵

3. Perlindungan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak kekayaan yang bersifat immateril dan merupakan hak kebendaan.¹⁶ Hak kekayaan immateril adalah suatu hak kekayaan yang objek haknya adalah benda tidak berwujud (benda tidak bertubuh).¹⁷ Pengertian hak kebendaan sendiri menurut Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan adalah hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberi kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat

¹⁰ Laden Marpaung, **Asas Teori Praktik Hukum Pidana**, VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 7.

¹¹ <http://kbbi.web.id/delik>, Diakses pada 03 November 2015.

¹² Laden Marpaung, *Loc. Cit.*

¹³ *Ibid.* Hlm. 8.

¹⁴ *Ibid.* Hlm 8.

¹⁵ Teguh Prasetyo, **Hukum Pidana**, I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 147.

¹⁶ H.OK.Saidin, *Op.Cit.* hlm. 111.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 52.

dipertahankan terhadap siapapun juga.¹⁸ Hak cipta sebagai hak kebendaan memberikan dasar teoritis bahwa hak cipta dapat dipertahankan dari siapapun. Hal ini dibuktikan dalam UUHC 2014, yang memberikan jalan, baik sanksi pidana maupun gugatan perdata guna mempertahankan haknya tersebut. Salah satu asas yang melekat pada hak kebendaan adalah *droit de suite*, asas hak mengikuti bendanya.¹⁹ Hak cipta dilindungi sebagai hak milik, karena hak cipta merupakan hak kebendaan yang immateril. Hak milik ini menjamin pemilik untuk menikmati secara bebas dan melakukan tindakan hukum dengan bebas terhadap miliknya.²⁰

Perlindungan hak cipta mulai tumbuh dengan jelas sejak ditemukannya mesin cetak pada abad pertengahan di Eropa.²¹ Kebutuhan terhadap perlindungan hak cipta ini timbul karena dengan mesin cetak, karya-karya cipta dengan mudah diperbanyak secara mekanikal. Sebelum ditemukan mesin cetak oleh J. Guetenberg proses untuk membuat salinan dari sebuah karya memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya asli. Perkembangannya isi dan ruang lingkup perlindungan hak cipta mendapat kritik keras dari filsuf Eropa. Mereka menganggap yang menikmati perlindungan hanyalah pengusaha percetakan dan penerbit. Pencipta karya cipta itu sendiri tidak memperoleh perlindungan yang semestinya.²²

Alasan yang mendasari adanya perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta adalah seseorang telah mencurahkan usahanya untuk menciptakan atau menemukan sesuatu. Sudah seharusnya mereka mempunyai hak alamiah atau dasar untuk mengontrol atas apa yang telah diciptakannya. Pemahaman ini menyiratkan

¹⁸ *Ibid.* hlm. 48-49.

¹⁹ *Ibid.* hlm 111.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Rachmadi Usman, I, **Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia**, PT. ALUMNI, Bandung, 2003, hlm. 55.

²² *Ibid.*

kewajaran dan keadilan.²³ Akan tampak tidak adil, bila seseorang mencuri usaha pencipta, dengan menggunakan karya mereka guna kepentingan komersial tanpa meminta izin terlebih dahulu. Berdasarkan uraian diatas, tujuan dari perlindungan hak cipta tersebut, untuk melindungi hak-hak yang seharusnya diterima pencipta atau pemegang hak cipta dari tindakan orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Hak cipta, seperti hak-hak lainnya yang dikenal dalam KI digolongkan sebagai hak milik pribadi yang tidak berwujud.²⁴ Konsep yang mendasari dalam perlindungan hak cipta adalah hak cipta tidak melindungi ide-ide, gagasan-gagasan, informasi, dan/atau fakta-fakta. Hak cipta melindungi perwujudan dari ide, gagasan, informasi, dan/atau fakta tersebut. Sejalan dengan konsep tersebut L. J. Taylor juga mengungkapkan bahwa yang dilindungi hak cipta adalah ekspresi dari sebuah ide, jadi bukan melindungi ide itu sendiri.²⁵ Pasal 2 persetujuan TRIPs juga menegaskan bahwa perlindungan hak cipta diberikan untuk pengungkapan ide-ide, tata cara, metode dari pengoperasian konsep matematika.²⁶

Perlindungan hak cipta erat hubungannya dengan pelanggaran hak cipta. Mengingat tujuan dari perlindungan hak cipta sendiri, untuk melindungi hak-hak pencipta dari tindakan pelanggaran yang dapat merugikan pencipta atau pemegang hak cipta. Ditetapkannya delik biasa dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, yang selanjutnya disebut UUHC 2002, dimaksudkan untuk menjamin perlindungan yang lebih baik dari sebelumnya. Delik biasa pada waktu UUHC 2002 berlaku, dianggap lebih baik memberikan perlindungan. Alasan delik biasa dianggap lebih baik memberikan perlindungan karena pelanggaran hak cipta dapat di perkarakan di Pengadilan secara cepat dan tidak perlu menunggu pengaduan terlebih dahulu dari

²³ Sayud Margono, *Op.Cit.*, hlm. 4.

²⁴ *Ibid.* hlm. 25.

²⁵ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, I, **Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 46.

²⁶ Sayud Margono, *Op.Cit.*, hlm.8.

pencipta atau pemegang hak cipta. Delik biasa memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum, untuk secara langsung menindak pelanggaran hak cipta, tanpa menunggu aduan dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pencipta atau pemegang hak cipta merasa lebih terbantu dengan adanya sikap aktif aparat penegak hukum. Sikap aktif aparat penegak hukum tersebut juga diharapkan dapat mengurangi tindakan pelanggaran hak cipta, sehingga pencipta atau pemegang hak cipta semakin terlindungi.

UUHC 2014 tidak lagi mempertahankan delik biasa, terkait pelanggaran hak cipta. Delik aduan yang digunakan dalam UUHC 2014, membatasi ruang gerak aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti pelanggaran hak cipta. Hal ini disebabkan karena delik aduan tidak memberikan kewenangan bagi aparat penegak hukum untuk langsung melakukan tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hak cipta. Delik aduan sangat mungkin meningkatkan pelanggaran terhadap hak cipta, karena pelanggaran hak cipta hanya dapat ditindaklanjuti setelah adanya aduan dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hanya menunggu pengaduan dari pencipta atau pemegang hak cipta, tentunya akan memberikan kesempatan bagi pelanggaran hak cipta yang tidak diadukan terus berjalan.

B. Tujuan Pengaturan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Tujuan Perubahan Delik

Setiap perubahan dapat dipastikan bertujuan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik lagi dari pencapaian sebelumnya. Begitu juga halnya dengan perubahan sifat delik UUHC yang dilakukan oleh pembuat undang-undang. Perubahan sifat delik UUHC pertama kali terjadi pada UUHC 1987, yaitu dari delik aduan menjadi delik biasa. Tujuan perubahan delik untuk pertama kalinya ini, bila dilihat dari faktor yang mendorong perubahan, maka bertujuan untuk mengurangi pelanggaran hak cipta. Delik aduan yang digunakan oleh UUHC

1982, menyebabkan pelanggaran hak cipta mencapai pada tingkat yang membahayakan. Keadaan tersebut, menyebabkan pembuat undang-undang mengubah sifat delik aduan menjadi delik biasa.

Perubahan delik yang kedua terjadi pada UUHC 2014, yaitu dari delik biasa kembali lagi pada delik aduan. Diubahnya sifat delik ini bertujuan untuk semakin menegaskan bahwa hak cipta adalah hak yang bersifat personal, yaitu hak pribadi. Sudah selayaknya hak yang bersifat pribadi tersebut, apabila terjadi pelanggaran harus ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Perubahan delik biasa menjadi delik aduan tersebut bertujuan untuk memperjelas subyek yang dirugikan atas terjadinya pelanggaran hak cipta. Bila menggunakan delik biasa aparat penegak hukum sulit untuk mengetahui siapa pencipta atau pemegang hak cipta dari suatu karya yang disalahgunakan tersebut. Oleh karena itu menurut peneliti tujuan diubah nya delik pada UUHC tahun 2014 telah sesuai dengan tujuan diubahnya UUHC tahun 2002 ke UUHC tahun 2014 karena dalam hal ini aparat penegak hukum mudah untuk mengetahui siapa pencipta dari suatu karya yang ada. Hal yang serupa tidak akan terjadi bila digunakan delik aduan, dengan delik aduan akan jelas siapa pencipta atau pemegang hak dari suatu karya yang disalahgunakan.

Hal tersebut disebabkan karena bila menggunakan delik aduan, pencipta atau pemegang hak cipta sendiri yang akan melapor kepada aparat penegak hukum. dan hal tersebut akan membuat pencipta merasa kesulitan karena dalam hal ini pencipta sendiri yang harus mencari tahu apakah ciptaannya disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang hanya mencari keuntungan dari ciptaan yang mereka buat dengan susah payah. Apalagi disini pencipta tidak dapat melindungi ciptaannya karena kesulitan dalam melindungi ciptaannya.

2. Faktor yang Mendorong Perubahan

Perubahan tidak akan terjadi begitu saja tanpa adanya penyebab yang dapat mendorong timbulnya perubahan tersebut. Begitu pula yang terjadi dalam perubahan delik hak cipta. Alasan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang diungkapkan pada saat seminar RUU Hak Cipta di Universitas Trisakti, perubahan delik tersebut berkaitan dengan sifat kepemilikan itu sendiri.²⁷ Kepemilikan hak cipta itu sifatnya pribadi, sehingga sudah hal yang wajar bila pribadi yang dirugikan itu sendiri yang mengadu pada aparat penegak hukum agar kasusnya ditindaklanjuti.

Penggunaan delik biasa dirasa kurang efektif karena aparat penegak hukum dalam menentukan apakah suatu karya itu asli atau hasil pelanggaran hak cipta itu tidak mudah. Selain itu, pada saat delik biasa digunakan dalam UUHC, aparat penegak hukum kesulitan dalam mencari alat bukti. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, delik biasa dirasa kurang efektif karena bila suatu pelanggaran hak cipta secara otomatis diproses, maka aparat penegak hukum sulit untuk mengetahui pihak yang memiliki karya tersebut. Setelah pelanggaran hak cipta sampai di pengadilan, dalam banyak kasus pencipta atau pemegang hak cipta tidak mau hadir dalam persidangan. Menurut narasumber, hal tersebut akan menjadi percuma, karena tidak jelas untuk siapa aparat penegak hukum melakukan tindakan tersebut. Disisi lain, delik biasa lebih fleksibel bila dibandingkan dengan delik aduan. Fleksibel disini maksudnya, penyidik dapat lebih mudah dan cepat untuk memberantas pelanggaran hak cipta.

Salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan sifat delik biasa menjadi delik aduan tersebut adalah era MEA. Negara-negara yang menjadi anggota

²⁷ <http://m.hukumonline.com>, “Hindari Polisi Nakal, RUU Hak Cipta Gunakan Delik Aduan”, Rabu, 04 Juni 2014. Diakses pada 12 November 2015.

ASEAN menerapkan delik aduan dalam hal pelanggaran terhadap hak cipta. Misalnya Malaysia dalam *COPYRIGHT ACT 1987 Incorporating all amendments up to 1 January 2006*, menjelaskan bahwa malaysia menerapkan delik aduan terhadap pelanggaran hak cipta. Contoh lain ialah dalam Pasal 66 *COPYRIGHT ACT BE 2537*, yaitu undang-undang tentang hak cipta Thailand. Penggunaan delik negara-negara ASEAN dikatakan berpengaruh karena, dalam era MEA dengan mudah karya-karya dapat masuk ke negara-negara anggota MEA. Apabila Indonesia tetap mempertahankan menggunakan delik biasa, maka kepentingan orang asing di Indonesia sangat terlindungi. Hal ini disebabkan karena apabila karya warga negara asing disalahgunakan di Indonesia, warga negara asing tidak perlu datang ke Indonesia untuk melapor. Aparat penegak hukum mempunyai kewenangan untuk menindak setiap ada pelanggaran hak cipta, tanpa adanya laporan dari pihak yang dirugikan. Kepentingan warga negara Indonesia sendiri di negara lain tidak dapat terlindungi secara maksimal, hal ini disebabkan karena negara-negara tersebut menggunakan delik aduan. Untuk itu, apabila karya warga negara Indonesia disalahgunakan di negara lain, warga negara Indonesia harus datang ke negara tersebut untuk melaporkan pelanggaran tersebut. Apabila warga Indonesia yang dirugikan akibat adanya pelanggaran hak cipta tidak melapor, maka pelanggaran tersebut tidak dapat ditindaklanjuti.

3. Konsekuensi Perubahan Delik

Perubahan delik biasa menjadi delik aduan dalam UUHC, memang mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Menurut narasumber dampak positif delik aduan adalah akan terdapat kejelasan tentang siapa penciptanya, siapa yang dirugikan atas pelanggaran tersebut, dan apabila kasus tersebut sampai ke pengadilan maka tidak akan sulit untuk menghadirkan pihak-pihak yang

dirugikan tersebut. Penggunaan delik aduan menurut Gunawan²⁸ seorang Praktisi Hak Kekayaan intelektual, dapat mencegah adanya oknum Polisi yang memanfaatkan delik ini untuk menambah pundi-pundi. Misalnya saja, razia program komputer bajakan, saat razia yang dilakukan oleh oknum polisi adalah memeras perusahaan yang tertangkap. Gunawan mengatakan bahwa, perusahaan yang tertangkap akan menjadi pemasukan bagi oknum-oknum tersebut. Tidak hanya oknum polisi, oknum jaksa juga banyak mengambil kesempatan. Sudah menjadi hal biasa bila pelanggaran hak cipta yang sampai ke pengadilan, artinya antara oknum polisi dan oknum jaksa, dengan pelanggar tidak terjadi kesepakatan soal harga.

Dampak positif perubahan delik dalam UUHC bagi aparat penegak hukum ialah terpecahkannya kesulitan-kesulitan yang timbul pada saat penggunaan delik biasa. Kesulitan yang timbul pada saat digunakannya delik biasa antara lain terkait dengan proses penegakan hukum. Delik biasa yang digunakan dalam UUHC 2002, pada kenyataannya mempersulit aparat penegak hukum dalam mencari alat bukti guna proses penyidikan. Digunakannya delik aduan akan mempermudah dan mempercepat proses penegakan hukum. Dikatakan mempermudah dan mempercepat proses penegakan hukum karena aparat penegak hukum tidak akan kesulitan dalam mencari barang bukti dan untuk membandingkan antara barang yang asli dan barang hasil pelanggaran. Alat bukti yang diperlukan tersebut telah disiapkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta sebagai pihak yang mengaduakan adanya pelanggaran hak cipta. Selain dua hal diatas, delik aduan yang digunakan dalam UUHC 2014 juga memudahkan aparat

²⁸ <http://m.hukumonline.com>, “Hindari Polisi Nakal, RUU Hak Cipta Gunakan Delik Aduan”, Rabu, 04 Juni 2014. Diakses pada 12 November 2015.

penegak hukum dalam menghadirkan saksi, apabila pelanggaran hak cipta sampai dalam tahap persidangan.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan dari dua (2) pokok permasalahan diatas yang telah dikemukakan, dapat diambil kesimpulan dari penelitian penulis atau hasil dan pembahasan diatas, diuraikan sebagai berikut :

1. Implikasi Yuridis Perubahan Jenis Delik pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah kehendak negara untuk melindungi pencipta atau pemegang hak cipta, serta kehendak negara untuk terlibat dalam pergaulan internasional dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual. Adanya kehendak untuk memudahkan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum, juga menjadi salah satu faktor pendorong perubahan delik. Perubahan delik biasa menjadi delik aduan tidak memperlemah perlindungan terhadap pencipta atau pemegang hak cipta. Perubahan tersebut justru memberikan kepastian kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas tuntasnya penyelesaian pelanggaran hak cipta yang diadukan. Delik aduan menyebabkan Pencipta atau pemegang hak cipta semakin diakui sebagai yang berhak atau dengan kata lain pencipta atau pemegang hak cipta tidak hanya dianggap sebagai pelengkap. Oleh karena itu UUHC 2014 tidak lagi mempertahankan delik biasa pada UUHC No.19 Tahun 2002 pasal 19 terkait pelanggaran hak cipta. Delik aduan yang digunakan dalam UUHC 2014 pasal 120 UUHC No. 28 Tahun 2014, membatasi ruang gerak aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti pelanggaran hak cipta. Hal ini disebabkan

karena delik aduan tidak memberikan kewenangan bagi aparat penegak hukum untuk langsung melakukan tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hak cipta. Delik aduan sangat mungkin meningkatkan pelanggaran terhadap hak cipta, karena pelanggaran hak cipta hanya dapat ditindaklanjuti setelah adanya aduan dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hanya menunggu pengaduan dari pencipta atau pemegang hak cipta, tentunya akan memberikan kesempatan bagi pelanggaran hak cipta yang tidak diadukan terus berjalan.

2. Setiap perubahan dapat dipastikan bertujuan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik lagi dari pencapaian sebelumnya. Begitu juga halnya dengan perubahan sifat delik UUHC yang dilakukan oleh pembuat undang-undang. Perubahan sifat delik UUHC pertama kali terjadi pada UUHC 1987, yaitu dari delik aduan menjadi delik biasa. Tujuan perubahan delik untuk pertama kalinya ini, bila dilihat dari faktor yang mendorong perubahan, maka bertujuan untuk mengurangi pelanggaran hak cipta. Delik aduan yang digunakan oleh UUHC 1982, menyebabkan pelanggaran hak cipta mencapai pada tingkat yang membahayakan. Keadaan tersebut, menyebabkan pembuat undang-undang mengubah sifat delik aduan menjadi delik biasa. Perubahan delik yang kedua terjadi pada UUHC 2014, yaitu dari delik biasa kembali lagi pada delik aduan. Diubahnya sifat delik ini bertujuan untuk semakin menegaskan bahwa hak cipta adalah hak yang bersifat personal, yaitu hak pribadi. Sudah selayaknya hak yang bersifat pribadi tersebut, apabila terjadi pelanggaran harus ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Perubahan delik biasa menjadi delik aduan tersebut bertujuan untuk memperjelas subyek yang dirugikan atas terjadinya pelanggaran hak cipta. Bila menggunakan delik biasa aparat penegak hukum sulit untuk mengetahui siapa pencipta atau pemegang hak cipta dari suatu karya yang disalahgunakan tersebut. Oleh karena

itu menurut peneliti tujuan diubah nya delik pada UUHC tahun 2014 telah sesuai dengan tujuan diubahnya UUHC tahun 2002 ke UUHC tahun 2014 karena dalam hal ini aparat penegak hukum mudah untuk mengetahui siapa pencipta dari suatu karya yang ada. Hal yang serupa tidak akan terjadi bila digunakan delik aduan, dengan delik aduan akan jelas siapa pencipta atau pemegang hak dari suatu karya yang disalahgunakan. Hal tersebut disebabkan karena bila menggunakan delik aduan, pencipta atau pemegang hak cipta sendiri yang akan melapor kepada aparat penegak hukum.

A. SARAN

1. Perubahan delik memberikan kepastian hukum kepada pencipta atau pemegang hak cipta, karena dengan digantinya delik biasa menjadi delik aduan menjadikan pencipta atau pemegang semakin diakui sebagai yang berhak atau dengan kata lain pencipta atau pemegang hak cipta tidak hanya dianggap sebagai pelengkap, namun sebaiknya sanksi yang diberikan bagi pelanggar hak cipta itu sendiri semakin dipertegas, dan atau semakin berat.
2. Diubahnya sifat delik biasa menjadi delik aduan semoga akan terus sesuai dengan tujuan awal diubahnya UUHC 2002 menjadi UUHC 2014, apalagi dalam UUHC 2014 lebih menegaskan bahwa hak cipta sepenuhnya merupakan hak pribadi oleh karena itu harus ada pengaduan dari pihak yang dirugikan terlebih dahulu sebelum menangani kasus hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ashofa, B. **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
- Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, **Pokok-pokok Hukum Pidana**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Djumhana dan Djubaedillah, **Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Djumhana, M. & Djubaedillah, R. **Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia)**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Hamidi, **Metode Penelitian dan Teori Komunikasi**, UMM Press, Malang, 2010.
- Hasbir Paserangi & Ibrahim Ahmad, **Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Komputer Dalam Hukungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs di Indonesia**, Rabbani Press, Jakarta, 2011.
- Henry Sulistio Budi, Law Rivew Volume X No. 3, **Delik Biasa VS Delik Aduan Dalam Undang-Undang Hak Cipta Kajian Yuridis dan Pragmatis**, 2011.
- Imam Sjahputra, **Hak Atas Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)**, Harvarindo, Jakarta, 2007.
- Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang 2012.
- Laden Marpaung, **Asas Teori Praktik Hukum Pidana**, VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Leden Marpaung, **Tindak Pidana Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual** Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Lindsey, T. Dkk, **Hak Kekayaan Intelektual**, PT. ALUMNI, Bandung, 2002.
- Lutviansori Arif, **Hak Cipta Dan Perlindungan Folklor Di Indonesia**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Margono, S. & Angkasa, A, **Komersiliasi Aset intelektual aspek hukum bisnis**, Grasindo, Jakarta, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir, **Kajian Hukum Ekonomi, Hak Kekayaan Intelektual**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, I, **Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1993.
- Nurachmad, **Segala tentang HAKI Indonesia Buku Pintar Memahami Aturan HAKI Kita**, Buku Biru, Yogyakarta, 2012.
- OK, Saidin, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- O.C.Kaligis, **Teori-Praktik Merek dan Hak Cipta**, Penerbit P.T Alumni, Bandung, 2012.
- P.A.F Lamintang, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Cet 2, Sinar Baru, Bandung, 1990.
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum (Edisi Revisi)**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Purba, A, **Pemberdayaan Perlindungan hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia**, PT. Alumni, Bandung, 2012.

- Rachmad Baro, **Penelitian Hukum Non-Doktrinal : Penggunaan Metode & Teknik Penelitian Sosial di Bidang Hukum**, Deepublish|Publisher, Yogyakarta, 2016.
- Rachmadi Usman, I, **Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia**, PT. ALUMNI, Bandung, 2003.
- Rahmi Jened, **Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Sardjono, A, **Hak kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional..** PT. Alumni, Bandung, 2010.
- Sayud Margono, **Hukum & Perlindungan Hak Cipta**, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003.
- Sedarmayanti, & Hidayat, S, **Metodologi Peneltian**, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Sedyawati, Edi, **Budaya Indonesia : Kajian Arkeologi, Seni dan Sejarah**, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Setyawati, Edi, **Warisan Tradisi, Penciptaan dan Perlindungan**, Wedatama Widya Sastra, Jakarta, 2013.
- Sims. M.C. & Stephens M, *Living Folklore: An Introduction to The Study of People and Their Tradisions*, Utah State University Press, Logan, Utah, 2005.
- Soekanto, S. **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)**, C.V. Rajawali, Jakarta, 1990.
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)**, RajawaliPers, Jakarta, 2001.
- Sudarto, **Hukum Pidana I A dan I B**, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1975.
- Sudarto, **Hukum Pidana I A dan I B**, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990.
- Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Sumandar, Haris. , & Sitanggang, Sally, **Mengenal Hak Kekayaan Intelektual**, Esensi, Jakarta, 2008.
- Supramono, G., **Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukum**, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Supratman, **Metode Penelitian Hukum**, Alvabeta, Malang, 2012.
- Sunggono, B., **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Tamotsu Hozumi, **Asian Copyrights Handbook Indonesian Version Buku Panduan Hak Cipta Asia, Jakarta: Asia/pacific Cultural Centre for UNESCO**, Ikatan Penerbit Indonesia, 2004.
- Teguh Prasetyo, **Hukum Pidana**, I, PT. Raja Grafinfo Persada, Jakarta, 2010.
- Tomi Suryo Utomo, **Hak Kekayaan Intelektual (HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL) di Era Global**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Wiryo Prodjodikoro, **Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Yustisia, Tim Visi. **Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, Hingga Menyelesaikan Sengketa**, Visimedia, Jakarta, 2015.

Peraturan Perundang-Undang:

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 266).

Skripsi

Mega Silviana Kurniawati.M, **Konsekuensi Perubahan Sifat Delik Pelanggaran Hak Cipta terhadap Perlindungan Pencipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**, Yogyakarta, 2015.

Mirwansyah, **Analisa Hukum Terhadap Tindak Pidana Hak Cipta (Ditinjau dari Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**, Jakarta, 2017.

Aan Priyatna, **Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta dalam Pembuatan E-Book**, Semarang, 2016.

Zainul Amin, **Penegakan Hukum terhadap Hak Cipta dalam Bidang Industri Kreatif di Negara Kesatuan Republik Indonesia**, Surabaya, 2018.

Media Online:

Lilik Mulyadi, 2014, **Hindari Polisi Nakal, RUU Hak Cipta Gunakan Delik Aduan** (online), <http://m.hukumonline.com>, “Hindari Polisi Nakal, RUU Hak Cipta Gunakan Delik Aduan”, diakses pada tanggal 12 November 2017.

Utsman Ali, 2015, **Pengertian Haki Hak Atas Kekayaan Intelektual** (online), <http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-haki-hak-atas-kekayaan.html#>, diakses pada tanggal 23 Februari 2018.

Kompas, 2012, **Bantengan Seni Tari Tradisional dari Malang** (online), <http://sosbud.kompasiana.com/2012/08/25/bantengan-seni-tari-tradisional-dari-malang-488664.html>, diakses pada tanggal 26 Februari 2018.